



www.kemhan.go.id
www.dmc.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WiRA

Volume 57 // No. 41 / November - Desember 2015

KERJASAMA SIPIL DAN MILITER

Belajar Dari Tragedi Paris

MEMAHAMI BELA NEGARA

**POLA MIGRASI PENDUDUK
PAHAM RADIKALISME
DAN STRATEGI PERTAHANAN**

**ALUTSISTA BERGERAK MILIK
INDONESIA DALAM 70 TAHUN**

**KUNJUNGAN MENTERI PERTAHANAN KE NATUNA
UNTUK MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA
DI WILAYAH TERDEPAN**

PROFIL SATKER:

**DIREKTORAT JENDERAL POTENSI
PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**



ISSN 1693-0231



INDONESIA



MENHAN DAN SEGENAP WARGA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
MENGUCAPKAN

**SELAMAT HARI NATAL
DAN
TAHUN BARU
2016**

Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca dengan WIRA edisi akhir tahun November-Desember 2015. Dalam edisi ini kami kedepankan artikel tentang Memahami Bela Negara kemudian dari Bapak Sjafrrie Sjamsoeddin mantan Wakil Menteri Pertahanan tentang Kerja Sama Sipil dan Militer (Belajar Dari Tragedi Paris), selain itu kami juga mengulas tentang Pola Migrasi Penduduk, Paham Radikalisme dan Strategi Pertahanan, Alutsista Bergerak Milik Indonesia Dalam 70 Tahun, Kunjungan Menteri Pertahanan ke Natuna Untuk Memperkuat Pertahanan Negara di Wilayah Terdepan, dan profil Satuan kali ini menampilkan Satker Ditjen Pothan Kemhan.

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Untuk memperkaya majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran. Bagi yang ingin mendapatkan majalah WIRA bisa menghubungi tim redaksi kami melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan *online* di laman www.dmc.kemhan.go.id.

Semoga majalah WIRA edisi November-Desember 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Daftar Isi

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasehat:

Menteri Pertahanan
Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan
Letjen TNI Ediwan Prabowo, S.I.P

Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan
Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si
(Han)

Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik
Kolonel Inf Drs. Silvester Albert Tumbol,
M.A.

Redaksi:

Letkol Arm Joko Riyanto, M.Si.

Pns Mutiara Silaen, S.Kom, M.AP.

Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.

Pns Eko Prasetyo, S.Kom, M.AP.

Pns Imam Rosyadi

Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

Percetakan & Sirkulasi:

Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan Oleh: Puskom Publik Kemhan,
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

MEMAHAMI BELA NEGARA



Peringatan hari bela negara tahun 2015 mengacu pada peristiwa sejarah 67 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 Desember 1948. Peristiwa pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atas inisiatif Mr Sjarifoedin Prawiranegara mendasari ditetapkannya hari bela negara. Nilai heroik tersebut perlu terus kita aktualisasikan dalam berbagai karya nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KERJASAMA SIPIL DAN MILITER Belajar dari Tragedi Paris



Seluruh dunia terhenyak oleh apa yang terjadi di Paris, Perancis. Serangan teror terjadi hari Jumat malam saat banyak orang sedang menikmati akhir pekan. Tidak tanggung-tanggung serangan terjadi di tujuh lokasi secara hampir bersamaan. Sedikitnya 132 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.



POLA MIGRASI PENDUDUK, PAHAM RADIKALISME DAN STRATEGI PERTAHANAN

Indonesia dengan 252,37 juta penduduknya (data BPS tahun 2015) telah mengalami banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya, dinamika sosial yang ada di negara sedang berkembang adalah suatu keniscayaan yang tidak terhindarkan.

ALUTSISTA BERGERAK MILIK INDONESIA DALAM 70 TAHUN

Sejarah militer suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa itu sendiri. Demikian pula Alutsista yang dimiliki dan dioperasikan oleh TNI berkembang sangat signifikan dan menyesuaikan dengan ancaman yang dihadapi pada masanya. Oleh karena itu sangat menarik apabila kita membandingkan jenis-jenis senjata yang kita miliki berdasarkan periodisasi sejarah bangsa ini.

KUNJUNGAN MENTERI PERTAHANAN KE NATUNA UNTUK MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH TERDEPAN

Kepulauan Natuna merupakan salah satu kepulauan yang berada di daerah perbatasan yang strategis di ujung utara Indonesia. Laut Natuna juga yang menjadi lintasan utama berbagai jenis kapal asing untuk kegiatan pelayaran dunia, mulai dari kapal niaga, kapal perikanan maupun kapal perang.

DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Ditjen Pothan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Pothan dipimpin oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan disebut Dirjen Pothan. Ditjen Pothan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer.

MEMAHAMI BELA NEGARA

Oleh:
TIM REDAKSI



“Indonesia tanah airku, akan kubela sepanjang masa” Slogan atau kata-kata bijak ini sering terpampang dalam berbagai spanduk ataupun diucapkan dalam berbagai seminar atau pertemuan-pertemuan berbagai kalangan masyarakat. Kata-kata penyemangat tersebut seyogyanya tidak hanya menjadi slogan atau pembangkit semangat serta penghias atau penyemarak suatu event.

Makna yang terkandung di dalamnya hendaknya tertanam di dada setiap insan Indonesia untuk selanjutnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran dan kebanggaan menjadi orang Indonesia dan kemudian mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari apapun profesinya merupakan tindakan bela negara demi tetap tegaknya NKRI dan demi kemajuan bangsa

Indonesia menuju kejayaan. Kesadaran bela Negara sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa.

Tanggal 19 Desember telah ditetapkan menjadi hari bela negara. Peringatan hari bela negara tidak saja mengingatkan bangsa Indonesia akan perjuangan mempertahankan Indonesia tetapi juga untuk mengingatkan segenap masyarakat Indonesia akan tanggung jawab dan komitmen mempertahankan NKRI dan sekaligus membawa Indonesia pada kejayaan

SEJARAH LAHIRNYA HARI BELA NEGARA

Penetapan hari bela negara didasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 28 Tahun

2006 tentang Hari Bela Negara. Isinya ada dua hal: 1) Tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara; 2) Hari Bela Negara bukan merupakan hari libur. Penetapan suatu hari besar tentunya bukan tanpa tujuan. Ditetapkannya tanggal 19 Desember sebagai hari Bela Negara, karena pada 19 Desember 1948 dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatra Barat. Para pahlawan bangsa terdahulu mempertaruhkan jiwa raganya untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah-tengah guncangan Agresi Militer Belanda II Sebagaimana diketahui, saat itu Belanda mengingkari perjanjian Renville dan menyerang kota Yogyakarta yang kala itu ibu kota negara. Mereka menawan Soekarno-Hatta dan menyatakan kepada dunia luar bahwa RI sudah berakhir. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Para pemimpin Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir sudah ditahan.

Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pemimpin

Pemerintah Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Perwiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya untuk mengadakan perundingan. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan menunjuk Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI. Keberadaan PDRI sangat penting untuk menekankan kontinuitas Republik Indonesia di dunia internasional. Kalau tidak ada PDRI maka Republik Indonesia secara hukum tidak ada lagi, karena pemimpin RI seperti Soekarno dan Hatta ditawan Belanda di dua tempat yang terpisah di Sumatera.

Tindakan Belanda dalam melakukan penyerangan ini akhirnya menimbulkan reaksi internasional. Dunia menuding Belanda bahwa mereka telah melakukan agresi pada sebuah negara yang berdaulat, dengan demikian melanggar prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).



BELA NEGARA DAN PERSEPSI ANCAMAN

Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI) sebagai wujud implementasi hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Bangsa Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan di bidang politik, keamanan dan ekonomi, namun juga menghadapi tantangan dalam mengelola kemajemukan. Kemajemukan bisa menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat bila kita mampu mengelolanya, tetapi banyak juga bangsa yang terpecah belah karena tidak mampu mengelola kemajemukan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki kualitas sikap mental dan perilaku cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka dari itu kesadaran bela negara sangat penting untuk ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku. Hal ini merupakan bentuk nyata revolusi mental sekaligus membangun daya tangkal bangsa menghadapi kompleksitas dinamika ancaman sekaligus mewujudkan ketahanan nasional.

Menhan dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan tentang ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Yang dimaksud ancaman nyata yaitu ancaman yang saat ini sedang kita hadapi dan sewaktu-waktu dapat terjadi, serta berpengaruh terhadap ketahanan nasional, seperti terorisme, radikalisme, separatis, pemberontakan dan bencana alam. Sedangkan ancaman belum nyata adalah konflik atau perang konvensional di mana yang berhadapan adalah kekuatan Alutsista antar negara.

Dunia baru saja diguncang teror bom yang mengerikan di Paris serta beberapa tempat lain diberbagai belahan dunia. Demikian juga fenomena ISIS serta radikalisme yang saat ini mengancam keamanan berbagai negara.



Menyikapi perkembangan lingkungan strategis dalam kawasan regional maupun global yang begitu pesat serta adanya potensi ancaman di atas, maka bangsa Indonesia harus melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menyiapkan SDM-nya. Langkah antisipatif tersebut salah satunya adalah melalui upaya pembelaan negara yang melibatkan seluru komponen bangsa Indonesia dengan cara mananamkan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara bila ditanamkan sejak dini kepada setiap warga negara akan meningkatkan kesadaran dan kemampuan bela negara.

KONSEP BELA NEGARA

Bela negara adalah kehendak Undang-Undang Dasar 1945, Bela negara adalah hak dan kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal itu bukanlah suatu yang berlebihan karena seluru warga negara Indonesia harus



membela negara sesuai yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu dalam pasal 30 ayat (1) berbunyi: “bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijawai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kesadaran bela negara salah satunya dibangun melalui program pembinaan kesadaran bela negara yang merupakan bagian dari suatu proses pembinaan SDM yang berkesinambungan agar tertanam nilai-nilai dasar dari Bela Negara yaitu: Cinta Tanah Air, Kesadaran Berbangsa & bernegara, Yakin

akan Pancasila sebagai ideologi negara, Rela berkorban untuk bangsa & negara dan Memiliki kemampuan awal bela negara. Penyelenggaraan penanaman nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air dan semangat bela negara dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan kerelaan berkorban. Pembinaan SDM juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga mampu menjadi komponen daya tangkal bangsa dalam mendukung pertahanan negara.

Pembinaan kesadaran bela negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan (Kemhan) semata, melainkan tanggung jawab bersama sebagai kewajiban dasar dan kehormatan setiap warga negara. Atas dasar tersebut, pendidikan dan pelatihan bela negara bagi seluruh warga negara adalah hal yang penting dan tidak dapat ditawar lagi. Pendidikan Bela Negara dipandang relevan dan strategis, disamping untuk pembinaan pertahanan negara juga berguna untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Dengan demikian sudah sepatutnya kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilandasi wawasan kebangsaan terus ditumbuhkembangkan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

KEMENTERIAN PERTAHANAN MEMBENTUK 100 JUTA KADER BELA NEGARA

Tugas-tugas bela negara bukan hanya tanggung jawab TNI semata, tetapi melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari guru, bidan, tenaga kesehatan, petani, buruh, professional, pegawai negeri sipil, pedagang, serta profesi lainnya. Oleh karena itu, kebersamaan dan kohesitas sangat diperlukan. Kebersamaan dan kohesitas ini akan tercapai apabila ada pemahaman yang jelas tentang peran dan fungsi masing-masing yang tentunya akan berdampak bagi penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mengimplementasikan hak-hak warga negara dalam pembelaan negara, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah menyelenggarakan program pembentukan kader bela negara. Program ini bertujuan menanamkan nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila serta rela berkorban. Selanjutnya para kader tersebut diharapkan mampu menyebarkan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat di lingkungannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Kemhan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Asosiasi Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan kader bela negara tahun 2015. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari gerakan nasional bela negara yang telah dicanangkan oleh Presiden RI pada peringatan hari bela negara tanggal 19 Desember 2014. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembentukan kader bela negara di kabupaten/kota yang ditandatangani antara Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Koordinator

Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Polri, TNI dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan terus membentuk kader-kader bela negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui program pembinaan kesadaran bela negara yang pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan di 45 Kabupaten/Kota yang berada di 11 Kodam. Program 100 juta Kader ini sebagai bagian dari upaya mendukung "Revolusi Mental" seperti yang tertuang dalam Program Nawa Cita Pemerintahan Kabinet Kerja dan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air dan kesadaran bela negara.





KERJASAMA SIPIL DAN MILITER

Belajar dari Tragedi Paris

Oleh:
Sjafrie Sjamsoeddin



sumber: mojok.co

Seluruh dunia terhenyak oleh apa yang terjadi di Paris, Perancis. Serangan teror terjadi hari Jumat malam saat banyak orang sedang menikmati akhir pekan. Tidak tanggung-tanggung serangan terjadi di tujuh lokasi secara hampir bersamaan. Sedikitnya 132 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Jumlah ini dikhawatirkan bertambah karena ratusan korban dalam kondisi kritis. Simpati mengalir dari seluruh penjuru dunia. Para pemimpin negara di dunia mengecam tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Secara tiba-tiba ada

sekelompok orang menembak secara membabi buta kepada kerumunan massa dan bahkan beberapa di antaranya meledakkan diri. Saat ini kita mencermati berbagai fenomena global yang implikasinya menimbulkan krisis. Memang muncul banyak ragam tafsir apa itu krisis. Sederhananya krisis bermakna kedaruratan yang berakibat kerusakan dan memerlukan tindakan cepat untuk mengatasinya baik skala makro dan mikro. Krisis bisa terjadi karena rekayasa manusia, tetapi bisa juga kejadian alam. Pemahaman dalam *crisis management* yang dikenal sebagai "*Threat is Real, but*

when” Tidak semua ancaman bisa dihalangi, tetapi harus diatasi dengan tindakan segera yang berkualitas dan jumlah yang memadai. Pengalaman menunjukkan bangsa yang memiliki kesigapan dalam perencanaan dan persiapan yang solid disertai kontrol yang ketat, akan mampu dengan tenang dan cepat merespon dalam mengatasi krisis.

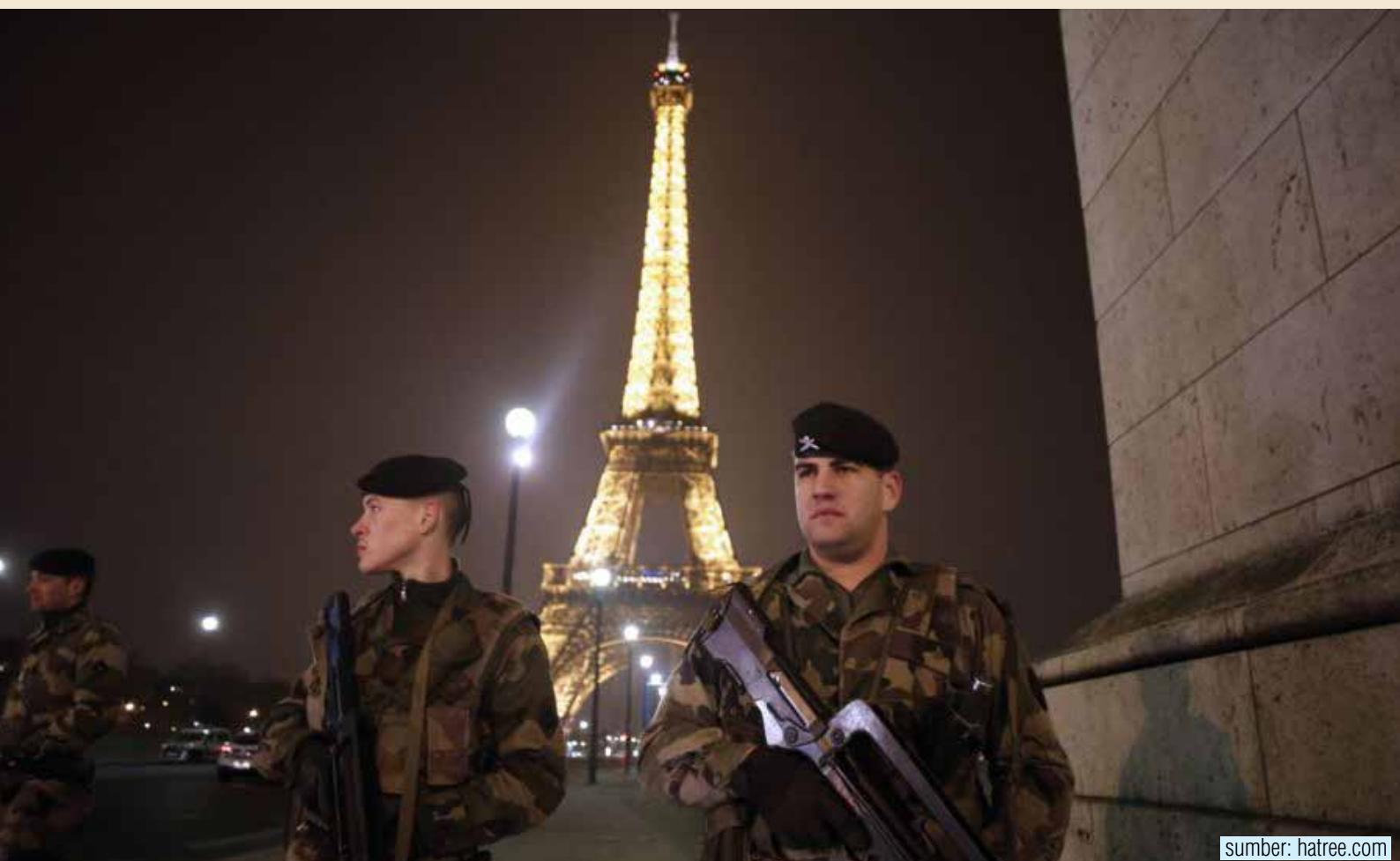
BUKAN AKTOR NEGARA

Tragedi yang terjadi di Paris membuka mata dan pikiran semua pihak bahwa dunia menghadapi ancaman yang tidak hanya datang dari *state actors*, tetapi nyatanya ada ancaman dari *non state actors*. Para pelaku serangan teror di Paris bukanlah pasukan negara asing, tetapi kelompok masyarakat bersenjata. Tantangan global kini dan mendatang mengindikasikan dunia tidak lepas dari ketidakpastian politik dan ekonomi. Ada kepentingan politik global dan “*shifting economic power*” yang dipastikan besar efek negatifnya bagi negara lain. Pada sisi strategis lain terjadi “*shifting military*

power” dari persenjataan pemusnah massal beralih ke intensitas diseminasi teknologi canggih baik *manned* dan *unmanned* yang dioperasionalkan dalam perang asimetris secara inkonvensional. Juga hadir mandala perang baru dalam teknologi informasi yaitu *increasing competence of hackers (Cyber Armies)*, popular dengan sebutan *Cyber War*. Fenomena strategis lainnya, korupsi dan *disloyal people* terhadap integrasi nasional terutama yang berciri plural. Jika mendalami observasi global maka ada faktor yang dominan berpengaruh yaitu geopolitik, *power*, kepentingan ditambah kebudayaan yang mempengaruhi terjadinya krisis suatu negara. Bagi Indonesia tentunya hanya satu sikap *collective response to protect the country*, yaitu kerja sama bahu membahu antara sipil dan militer.

INTERAKSI SIPIL DAN MILITER

Saat ini interaksi sipil dan militer sudah mendunia menyelesaikan semua permasalahan kelangsungan hidup



sumber: hatree.com

kemanusiaan dan kenegaraan. Bahkan itu menjadi strategi solusi di era demokrasi. Lihat saja bagaimana Perancis menangani serangan teror, di mana 1.500 pasukan militer langsung diterjunkan untuk ikut menangani persoalan. Hal yang sama terjadi di Amerika Serikat baik saat menghadapi serangan teror 11 September 2001 maupun Badai Katrina di New Orleans tahun 2005. Krisis yang terjadi tidak hanya ditangani oleh kekuatan sipil, tetapi juga melibatkan militer. *Federal Emergency Management Agency* yang dimiliki AS, merupakan lembaga negara yang bekerja lintas sektoral dan bertugas untuk menangani semua situasi kritis yang terjadi di negeri itu. Pendekatan mutualistik, interdependensi, dan konsultasi individu serta institusi telah menjadi suatu kekuatan preventif yang dibangun dalam kerangka kerja sama sipil dan militer. Interaksi sipil dan militer mengenal tiga elemen: pertama, bertukar informasi kapasitas; kedua, membangun tim kerja dan pelatihan bersama lintas sektor sipil dan militer; ketiga, menyusun program bersama.

Secara universal dikenal dua tipe misi militer dan sipil bekerja sama. Dalam misi kemanusiaan disebut *humanitarian action*, sedang misi politik negara disebut *military action*. Ada pun pengerahan kekuatan militer menjadi kewenangan keputusan politik otoritas sipil yang berdaulat, yang lingkup penugasan militer pada area stabilisasi dan rekonstruksi krisis. Kapabilitas keahlian sipil sangat dominan dalam interaksi sipil dan militer. Area profesi sipil berkembang pesat tampak dari berbagai aspek, seperti penguasaan teknologi *hardware* dan *software*, medis, legal, manajemen lingkungan, ekonomi bisnis, dan teknologi informasi. Peran militer bersifat "*ultima ratio*", bukan penentu akhir tetapi menjadi elemen utama negara untuk menyelamatkan dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara pada kondisi krisis. Oleh karena itu

penugasan perlu kejelasan batas waktu dan skala penugasan. Militer profesional menjalankan misi berpegang kepada prinsip netral dan imparsial.

SPEKTRUM KERJA SAMA

Kemauan politik diperlukan untuk merumuskan konsep strategi terintegrasi operasionalisasi kerja sama sipil dan militer dalam manajemen krisis. Para teknokrat profesional sipil bekerja sama dengan personil militer dalam suatu misi gabungan merespon krisis. Faktor dominan kontrol parlemen dan arahan strategis dalam regulasi diperlukan untuk melegitimasi kerja sama sipil dan militer. Dalam era *civil society*, masa kini dan mendatang, kerja sama sipil dan militer menempati ruang yang luas. Indonesia sudah membangun peta jalan kerja sama mutualistik



dan merevitalisasi peran militer. Tentunya kita tidak bisa berhenti, bahkan diharapkan terus dilakukan optimalisasi dan sistematika oleh negara. Kita tidak boleh terkendala oleh faktor psikologis dan traumatis, tetapi lebih bijak memandang perlunya integrasi nasional menghadapi tantangan masa depan.

Esensi dari manajemen krisis adalah kepemimpinan dan manajemen yang dikembangkan secara terintegrasi dan terkendali. Faktor penting dalam manajemen krisis adalah kemampuan untuk mengambil keputusan cepat guna mengatasi krisis dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan dari seluruh kekuatan pertama yang ada. Semua unit pendukung kedaruratan harus cepat di mobilisasi ke daerah krisis. Informasi merupakan fakta yang dominan dalam manajemen krisis untuk mengantisipasi, merencanakan, dan mengendalikan krisis.



sumber: news.liputan6.com

Informasi mengenai infrastruktur (*critical infrastructure*) yang mempunyai nilai vital dan strategis harus menjadi bagian penting dalam manajemen mengantisipasi serangan teroris. Beberapa serangan teror terjadi disebabkan kegagalan melakukan identifikasi dan pengamanan wilayah sebagai pencegahan. Di dalam bidang teknologi informasi, kita sudah memiliki berbagai teknologi canggih. Hanya saja untuk efektivitasnya, kita membutuhkan dukungan *traditional resources* yang di Indonesia dikenal dengan pembinaan teritorial. Mereka lah sumber informasi pertama yang diperlukan untuk melakukan respons cepat.

Pengalaman menunjukkan manajemen krisis juga membutuhkan dukungan manajemen operasi media. Sebab, media perlu memperoleh sebanyak mungkin informasi yang tepat waktu. Jangan lupa dunia media tidak lepas dari sensasi terutama saat terjadi tragedi kemanusiaan dan korban sipil. Oleh karena itu, para pelaksana manajemen krisis harus bekerja dengan saksama. Fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit serta keperluan mendasar masyarakat akan jadi perhatian media, untuk itu penanganannya harus diutamakan. Saya berpendapat dalam manajemen krisis perlu dibentuk IBO (*Image Building Operation*) yang terus menerus hadir dalam memberikan informasi. Satu yang tidak boleh dilupakan adalah ancaman *cyber*. Ancaman *cyber* tidak mematikan tetapi melumpuhkan sistem negara.

Mengingat *Cyber War* ini tidak kenal batas dan waktu, maka organisasi Internasional seperti NATO perlu mengambil inisiatif untuk merancang pertahanan internasional *cyber*. Di Indonesia dilakukan interaksi dengan para *hackers* untuk merespon suatu pusat pertahanan *Cyber War*. Ada keperluan untuk merancang strategi pertahanan *cyber* secara terintegrasi guna mengamankan kepentingan nasional. Tuntutan TNI kini dan mendatang konsisten menjaga kode kehormatan tentara seraya mengembangkan intelektualisasi dan profesi mencapai *interoperability* pada skala misi militer dan interaksi mutualistik dengan kemampuan sipil.

POLA MIGRASI PENDUDUK, PAHAM RADIKALISME DAN STRATEGI PERTAHANAN

Oleh :

Prisca Delima

(Akademisi/Peneliti di Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Unhan)

PAHAM RADIKALISME

Indonesia dengan 252,37 juta penduduknya (data BPS 2015) telah mengalami banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya, dinamika sosial yang ada di negara sedang berkembang adalah suatu keniscayaan yang tidak terhindarkan. Namun demikian, hal yang tetap harus diwaspadai adalah gagasan radikalisme yang ada seturut dinamika sosial tersebut, baik yang nyata-nyata terlihat ataupun yang tidak terlalu terlihat. Karena, walaupun Indonesia berdasarkan konstitusi bukanlah suatu negara agama, namun paham radikalisme berlindung dibalik agama telah ada dan merasuk di masyarakat sejak lama.

Kelompok dengan paham radikal mungkin hanya berskala kecil belaka, namun demikian, sejumlah kelompok radikal nyata-nyata telah mengganggu dan bisa jadi akan mencoba mengganggu lagi di masa depan agar tercipta kekacauan dalam kedamaian masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, kebebasan beragama dan sosial yang ada malah digunakan dengan sengaja untuk memperkenalkan dan memperkuat keberadaan paham radikalisme. Walau apabila dipertanyakan bahwa apakah kebebasan dapat dituding sebagai penyebab tersebar luasnya paham radikalisme atau tidak, maka perdebatannya tentu akan panjang.

Apabila kita mau jujur, isu-isu terkini tentang gerakan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria* - Negara Islam Irak dan Syam) di Indonesia, bukanlah suatu bentuk gerakan radikal berkedok agama semata. Ada alasan yang lebih mendasar yang sifatnya lebih struktural selain itu, bahkan daftar alasannya pun bisa panjang. Bagaimanapun juga terkait dengan masalah sosial, kesenjangan yang ada akibat ketidakmerataan kemakmuran



sumber: news.liputan6.com

penduduk, ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan sosial saat ini, telah cukup membuat sejumlah orang tergoda dan bersedia bergabung dalam misi ISIS. Baik yang berasal dari latar belakang Islam ataupun yang mendadak berganti agama, mereka semua terpikat dengan gagasan untuk "berjuang" bersama gerakan ISIS. Janji-janji tentang perbaikan kondisi ekonomi dan spiritual yang sedemikian rupa dinyatakan dalam berbagai bentuk iklan ISIS, kemudian menjadikan mereka seakan buta terhadap penjelasan logis lainnya.

POLA MIGRASI PENDUDUK DI INDONESIA

Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam pola-pola migrasi penduduk dalam dua dekade terakhir ini. Dalam hal ini, migrasi dan mobilitas penduduk sangatlah terkait dengan kebijakan migrasi, desentralisasi serta pembangunan sosial-ekonomi. Berbagai kebijakan tersebut kemudian meninggalkan tanda nyata dalam dinamika populasi yang terjadi.

Pertumbuhan cepat urbanisasi karena pembangunan serta penciptaan wilayah administratif baru dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi juga turut memainkan peran penting. Selain itu, sejumlah fakta juga menunjukkan bahwa daerah-daerah tertentu yang pendapatan warganya didominasi hasil kerja penduduk yang bekerja di luar negeri, juga dikenal sebagai daerah di mana benih-benih paham radikalisme dapat tumbuh dengan subur.

Di sisi lain, mengingat masyarakat Indonesia di berbagai daerah juga sangat setia dan sangat mendengarkan pemimpin agama yang ada, maka bisa jadi para pemimpin agama (baik Islam maupun Non-Islam) juga turut berperan bahkan memiliki agenda tersendiri dalam menyebarkan paham radikalisme karena malah menganggapnya sebagai semacam gerakan yang diberkati sang Khalik.

Migrasi pikiran, gagasan, dan wacana atas paham radikalisme itu sendiri kemudian dapat tersebarluaskan melalui migrasi internal, atau dalam mobilitas penduduk di dalam negeri. Selain migrasi semacam itu, mengingat Indonesia menjadi jalur perlintasan migrasi internasional dari berbagai daerah konflik di negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan menuju ke negara-negara yang dianggap "aman", maka penyebaran paham radikalisme yang mungkin dibawa para migran adalah hal yang patut dicermati selain tentunya masalah-masalah kemanusiaan yang ada. Karena sebagai negara yang terbuka dengan begitu banyak titik akses masuk serta terbatasnya kendali dan pengawasan yang ada, migrasi dari luar negeri ataupun migrasi di dalam negeri sendiri akhirnya memberikan peluang bagi paham radikalisme dapat tersebar hingga ke seluruh pelosok dengan begitu mudahnya.



sumber: news.okezone.com



sumber: antaranews.com

Meskipun kesadaran atas paham radikalisme telah cukup banyak beredar di sekitar kita, termasuk wacana bagaimana paham ini perlu lebih diperhatikan dan dikendalikan; namun pada kenyataannya, masih perlu upaya komprehensif untuk menanggulangi hal ini. Data yang terbatas serta kurangnya informasi yang tersedia memang tidak dapat memberikan gambaran pasti mengenai sebesar apa pengaruh paham radikalisme di Indonesia, ataupun memberikan jumlah yang pasti mengenai penduduk yang ikut serta terbawa dan menerima paham radikalisme dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada data statistik yang dapat membuktikan atau menunjukkan peningkatan pasti keberadaan padam radikalisme. Namun demikian, gaung radikalisme dapat terdengar

di banyak media sosial, selain dalam berbagai diskusi baik formal maupun informal.

DINAMIKA MIGRASI PENDUDUK DI INDONESIA

Dalam dua dekade terakhir, migrasi yang terjadi di dalam negeri telah menciptakan pola persebaran penduduk yang lebih baik di Indonesia. Meskipun distribusi penduduk yang seimbang secara spasial sangatlah diperlukan dalam menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, namun di sisi lain, migrasi internal juga telah menciptakan konflik-konflik sosial di berbagai daerah. Tidak peduli sejauh apa konflik yang ada, migrasi memang diperlukan untuk mencari keseimbangan dalam masyarakat terutama dalam masyarakat yang sangat

heterogen seperti Indonesia. Timbulnya konflik akan menimbulkan biaya yang sangat mahal, dimana biaya tersebut tentunya akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kebutuhan lain seperti manajemen konflik, pembangunan infrastruktur serta pendidikan dan kesehatan.

Sejumlah daerah di Indonesia telah menunjukkan dinamika yang sangat mencolok pada dekade belakangan ini. Sentralisasi dan urbanisasi sangat tinggi yang terjadi di Jakarta pada masa lalu telah membuat perluasan daerah urban pun meluber hingga ke provinsi Banten dan Jawa Barat. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan pembangunan yang masif sehingga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi sangat tinggi kemudian menyebabkan Kepulauan Riau, Papua Barat, Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menjadi daerah tujuan migrasi baru (Data UNFPA 2015). Data demografis semacam ini dapat pula menjadi acuan untuk menunjukkan kerentanan daerah yang menerima migrasi penduduk. Peringatan akan adanya potensi konflik sosial dapat menyala terkait semakin meningkatnya kesenjangan yang ada di dalam masyarakat, distribusi kesejahteraan yang tidak merata antara penduduk lama dan pendatang baru,

serta terjadinya peningkatan persebaran paham radikalisme baik yang dibawa oleh pendatang baru ataupun yang timbul karena ketidakpuasan penduduk lama. Dalam hal ini, kasus konflik di Poso dan Maluku adalah bukti dari hasil yang tidak diinginkan dari pembangunan serta adanya “salah kelola” dalam konflik. Hal semacam ini pun berpotensi terjadi di daerah-daerah yang mengalami perubahan demografi yang luar biasa.

URGENSI MELAWAN GAGASAN RADIKALISME

Melihat pola migrasi penduduk di atas, membuat kita sadar bahwa melawan paham radikalisme dengan cara-cara yang cerdas adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Benih-benih paham radikalisme telah menyebar tanpa disadari percepatannya dalam beberapa dekade terakhir akibat kealpaan para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam memperhitungkan dinamika pola migrasi penduduk serta interaksi antara pola migrasi ini dengan dinamika sosial.

Berkaitan dengan itu, infrastruktur informasi yang pada saat ini telah jauh lebih baik, seharusnya dapat pula dimanfaatkan



sumber: sp.beritasatu.com

dengan cerdas dalam memastikan pertahanan dan keamanan serta menjaga keutuhan negara. Informasi seperti sekarang ini, kebebasan informasi memang suatu keniscayaan yang sudah sepertutnya kita sadari. Namun demikian, terkait masalah strategis, terdapat pula ungkapan yang beredar luas, bahwa siapa yang dapat mengendalikan informasi, akan dapat pula mengendalikan tempat di mana informasi tersebut beredar. Itulah yang perlu dilakukan.

Terkait hal tersebut, sudah menjadi peran negara untuk dapat menciptakan sistem yang tangguh untuk melawan paham radikalisme. Teknologi informasi pun seyogyanya dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan yang bersifat informatif dan mendidik masyarakat. Jika tidak dilakukan, maka penyusup pun dengan mudah merampas dan mengambil alih kekuasaan atas informasi dan menyebelunya untuk kepentingan mereka sehingga mengakibatkan situasi yang tidak diinginkan bagi kita.

PERTAHANAN SESUAI DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS

Karena kita hidup di dunia yang dinamis, Indonesia secara berkelanjutan perlu terus menyesuaikan strategi pertahanan dengan memperhitungkan pula dinamika yang ada dalam lingkungan strategis. Penurunan indeks pembangunan ekonomi regional baru-baru ini juga tanpa diundang telah memengaruhi Indonesia. Di sisi lain, tantangan atas tatakelola pemerintahan yang baik serta menciptakan harmoni di dalam masyarakat juga akan selalu membayangi perjuangan dalam kemajuan proses adaptasi yang berlangsung dengan secara bersamaan menciptakan keseimbangan dalam lingkungan strategis.

Strategi pertahanan yang berhasil tentunya adalah jalinan dari sejumlah rangkaian sistem yang ditenun dari pusat hingga daerah. Sistem informasi yang dipakai seyogyanya dapat dipergunakan untuk turut serta dalam menjamin pertahanan dan keamanan bagi seluruh rakyat, namun juga sekaligus membatasi akses beredar luasnya paham radikalisme.

Dalam hal ini, kesadaran akan batas-batas wilayah territorial Indonesia jangan



pula dipersempit dengan hanya berdasarkan "terra" daratan, namun perlu melampaui batas darat yang ada. Karena pada kenyataannya, sebagian besar batas-batas "teritorial" Indonesia berupa garis maya yang melingkupi perairan kepulauan Indonesia serta ruang udara di atasnya. Meskipun demikian, dengan melintasi batas-batas inilah orang dapat berlalu lalang melintas batas dalam perjalanan migrasi mereka. Mereka yang bermigrasi keluar masuk pun membawa berbagai intensi, yang mungkin berdasarkan niat baik ataupun yang kurang begitu baik, entah membawa berbagai gagasan yang



sumber: kaskus.co.id

mungkin berguna untuk Indonesia atau malah aneka paham radikalisme yang dapat mengoyak Indonesia dari dalam.

Berdasarkan hal di atas, dapat terlihat bahwa penyusunan strategi pertahanan pun sangat perlu disesuaikan dengan perubahan pola migrasi, baik migrasi lintas batas negeri ataupun migrasi internal yang ada. Perubahan komposisi demografi pun sudah seyogyanya masuk dan menjadi dasar strategi pembangunan termasuk strategi pertahanan. Dengan demikian, sangat jelas apabila data dinamika kependudukan dan pola migrasi menjadi hal yang sangat penting dalam

penyusunan strategi dan kebijakan. Hal ini mengingat bahwa apa yang kita butuhkan saat ini adalah strategi solid yang benar-benar dapat diterapkan strategi yang tidak hanya untuk mengurus rakyat Indonesia namun juga untuk merawat tanah, air (laut), dan ruang udara kita bersama.

ALUTSISTA BERGERAK MILIK INDONESIA DALAM 70 TAHUN

Oleh :

Letkol Tek Yudi Yuliadi, ST., M. Eng
Staf Pusada Baranahan Kemhan

Sejarah militer suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa itu sendiri. Demikian pula Alutsista yang dimiliki dan dioperasikan oleh TNI berkembang sangat signifikan dan menyesuaikan dengan ancaman yang dihadapi pada masanya. Oleh karena itu sangat menarik apabila kita membandingkan jenis-jenis senjata yang kita miliki berdasarkan periodisasi sejarah bangsa ini. Hal ini untuk menambah kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia atas apa yang pernah dan sedang kita miliki. Kebanggaan ini akan begitu tampak nyata apabila apa yang kita miliki memiliki keunggulan *comparative* dengan negara-negara dikawasan kita atau bahkan pada area

geografis yang lebih luas baik di Asia Pasifik maupun dunia.

Terlebih dahulu marilah kita mengingat-ingat kembali periodisasi sejarah nasional Indonesia untuk kita jadikan patokan yang jelas dalam melihat perkembangan Alutsista. Secara garis besar periodisasi sejarah Indonesia terbagi menjadi:

PERIODE MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN ATAU REVOLUSI NASIONAL (1945-1949)

Pada periode ini upaya-upaya yang dilakukan militer adalah untuk



sumber: garudamiliter.blogspot.com

mempertahankan kemerdekaan karena setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih belum mengakui kedaulatan wilayah Indonesia dan Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Ancaman militer saat itu sangatlah jelas yaitu ancaman militer Belanda serta negara-negara sekutunya.

Ditengah segala keterbatasan, satu-satunya sumber Alutsista adalah hasil rampasan dari Jepang maupun Belanda. Sebagai contoh adalah Tankette (Tank mini) yang dirampas dari tentara Jepang, kendaraan lapis baja *Universal Carrier*, M3 Stewart dan M4 Sherman yang dirampas dari Belanda setelah Agresi Militer kedua.

Sedangkan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) menggunakan Alutsista apa adanya yang cenderung merupakan kapal yang dipersenjatai dan bukan merupakan kapal perang. Selain rampasan dari Jepang ada juga kapal sumbang dari masyarakat yang pada umumnya berupa Kapal Kayu Patroli Pantai. Kondisi operasional ALRI sangat terjepit ketika terjadi perubahan kendali keamanan dari Inggris kepada otoritas Belanda NICA yang menerapkan blokade laut yang puncaknya terjadilah Agresi Militer Belanda Pertama yang meluluh lantakkan sebagian Alutsista ALRI seperti Kapal, Meriam, Mortar dan bahkan pangkalan ALRI.

Kapal Lete pengangkut barang milik Hj. Siti Hawa disumbangkan bagi Korps Armada ALRI dan diberi nama Kapal Kapten Pahlawan Laut. Angkatan Laut juga membeli kapal kayu jenis coaster berbobot 160 ton dari Singapura pada tahun 1946 dan diberi nama Gajah Mada-408. Mungkin pada masa itu, kapal inilah yang merupakan kapal terbesar yang dioperasikan ALRI.

Selain kapal-kapal kayu juga terdapat kapal pendarat/amfibi eks Pasukan Jepang kelas Daihatsu dengan bobot 21 ton dan kapal-kapal angkut dari kayu antara lain diberi nama "Äntareja", Sindoro, Semeru, Diponegoro serta Kapal Layar Motor Srikaton. Diantara semua kapal pada periode ini yang paling canggih adalah kapal-kapal cepat yang dibeli dari Singapura sebanyak 7 unit.

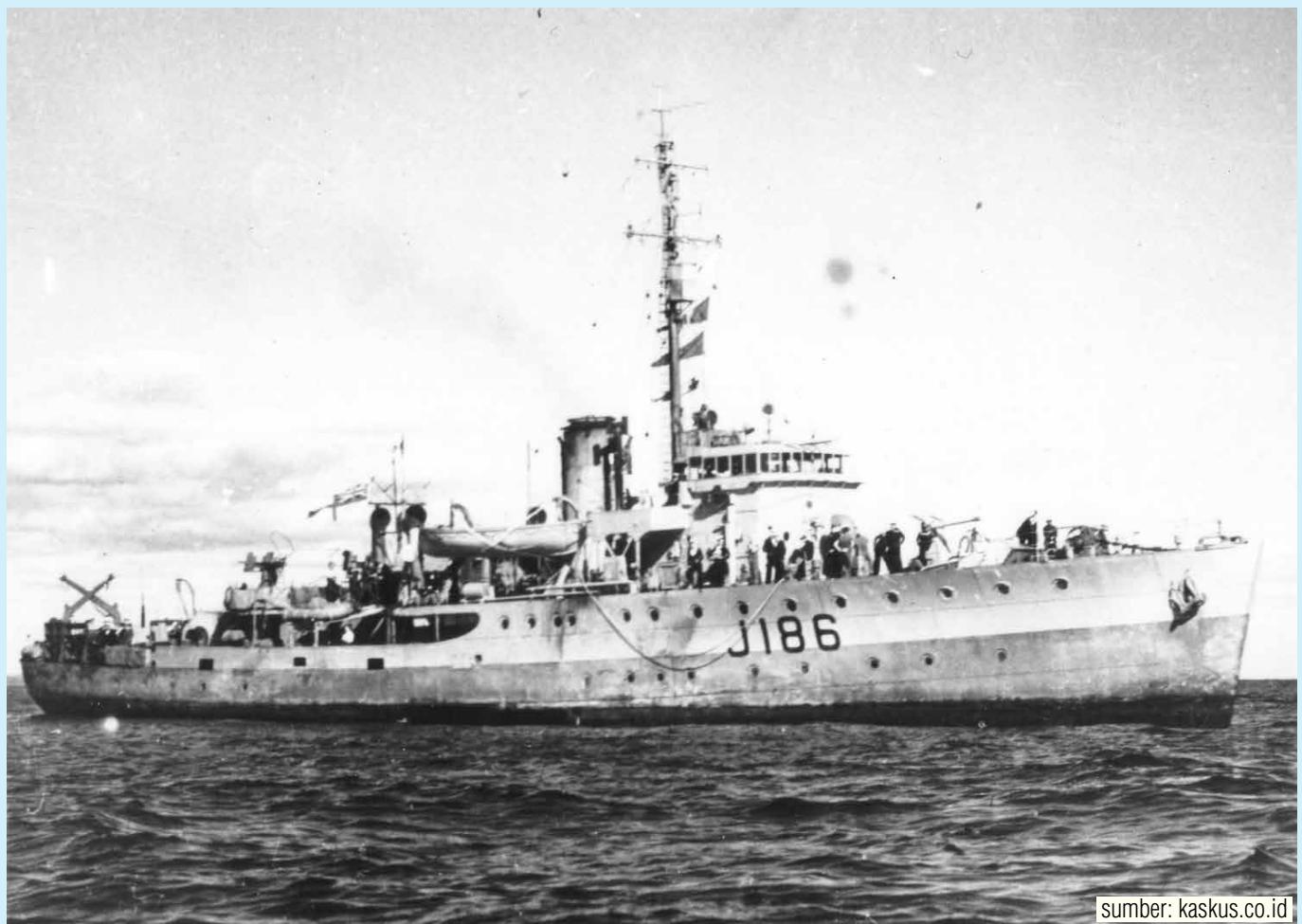
Saking terkenalnya dalam menembus blokade Belanda, salah satu *speed boat* berbobot 70 ton dan berkecepatan maksimal 17 knot yang dinamai the *Outlaw* mendapat julukan "The Black Speedboat" oleh otoritas Inggris dan Belanda.

Angkatan Udara bisa dikatakan memiliki Alutsista yang paling banyak. Maklum saja sejak Belanda bercokol di Indonesia, pesawat udara sudah digunakan sehingga di seluruh wilayah Indonesia sudah berdiri pangkalan-pangkalan udara. Pesawat-pesawat peninggalan Jepang berada di beberapa Pangkalan Udara (PU) antara lain di PU Maguwo terdapat Curen 70 unit, PU Bugis (Malang): Cukiu 25 unit, Nishikoren 9 unit, Nakashima 11 unit, Sansyksen 4 unit, Mitsubishi K-51 (Guntei) 7 unit, Sakai 7 unit, Rokojunana 1 unit, Shoki Ki 481 unit, di PU Morokrembangan 2 unit dan di PU Andir 11 unit berbagai macam pesawat. Disamping pesawat rampasan, terdapat pula pesawat sewaan maupun beli, antara lain 4 unit DC-3 Dakota, 2 unit PBY Catalina, 1 unit Avro Anson dan 1 unit Stinson L-5.

PERIODE DEMOKRASI LIBERAL (1949-1959)

Periode ini adalah periode pemerintahan Uni-Indonesia Belanda sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) dan diterapkannya sistem parlemen di Indonesia. Kondisi politik ditandai dengan sering bergantinya Kabinet sehingga Militer Indonesia menghadapi tantangan berupa banyaknya gangguan keamanan berupa pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS.

Untuk menghadapi situasi keamanan demikian secara umum operasi pertempuran darat masih didukung dari Alutsista ex-Jepang dan Belanda. Sebaliknya untuk operasi pertempuran di Laut setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda, Angkatan Laut memiliki Alutsista yang berasal dari hibah Belanda maupun hasil Pembelian. Dua kapal perang korvet buatan Australia dengan bobot 650 ton (RI Hang Tuah dan RI Pati Unus)



sumber: kaskus.co.id

diserahkan oleh Belanda pada Indonesia sebagai bentuk bantuan militer. Kapal serupa bekas pakai Inggris dan Belanda juga diserahterimakan pada tahun 1950 (RI Banteng dan RI Radjawali).

Sebanyak 25 unit kapal patroli atau *Harbour Defence Motor Launch* (HDML) buatan Inggris dengan bobot 54 ton dan kecepatan 11 knot, 12 kapal patroli kelas Alkai dengan (143 ton, 12 knot), 7 kapal patroli kelas Bango (194 ton, 11 knot), 7 kapal patroli kelas Durian (90 ton), 6 kapal patroli kelas Balam (200 ton), diserahkan kepada ALRI pada era tahun 1950-an. Selain itu terdapat juga Kapal pendarat Amfibi tipe *Landing Craft Infantry* (LCI) berbobot 250 ton dan kapal transport Cargo berbobot 750 Ton, Penyapu Ranjau berbobot 254 ton (Tipe MMS), 4 kapal patroli bobot 175 ton dan 6 kapal Buru Ranjau kelas Semeru dengan bobot 80 ton.

Bagi Angkatan Udara, pada periode ini terjadi pergeseran teknologi pesawat yang dimiliki Indonesia dari yang semula

berteknologi Jepang menjadi pesawat berteknologi Barat antara lain C-47 Dakota, B-25 Mitchell sebanyak 26 unit, B26 Invader, P-51 Mustang, AT-6 Harvard, PBY-5 Catalina, dan Lockheed L-12.

PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

Militer saat itu dipersiapkan untuk melancarkan aksi “Ganyang Malaysia” sehingga ancaman militer yang harus dihadapi saat itu adalah kekuatan militer Malaysia dan juga pasukan *Special Air Service* Australia yang membantu Malaysia. Pada periode ini juga terjadi operasi Trikora dalam rangka pembebasan Papua karena pihak Indonesia menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia sementara pihak Belanda menganggap Papua sebagai salah satu provinsi milik Belanda yang direncanakan akan diberi kemerdekaan pada tahun 1970. Oleh karena itu ancaman

militer pada saat operasi Trikora adalah militer Belanda.

Mulai tahun 1960, Angkatan Darat dilengkapi dengan kendaraan tempur EBR/FL-11 Panhard, 475 unit tank Ringan AMX-13, 55 unit Ferret Mk.2/3, FV 601 Saladin dan 60 unit FV 603 Saracen yang merupakan tank paling modern pada saat itu. Menghadapi boikot blok barat TNI AD juga berpaling ke blok timur dengan dibelinya BTR 40P, BTR 152 P dan PT-76.

Pada saat kondisi negara mulai membaik dari ancaman disintegrasi, berbagai peralatan tempur Angkatan Laut dari negara Eropa Timur memperkuat ALRI dan menjadi kekuatan dominan pada saat itu. Beberapa mesin perang yang terkenal di jajaran ALRI antara lain kapal penjelajah (*cruiser*) kelas Sverdlov RI Irian, 8 unit kapal perusak (destroyer) kelas 'Skory', 8 unit Fregat kelas 'Riga', 12 unit Kapal selam kelas 'Whisky', 12 unit kapal tempur cepat berpeluru kendali kelas 'Komar', 10 Fregat kelas Surapati, 8 kapal cepat Torpedo kelas Jaguar dimana termasuk didalamnya KRI Matjan Tutul yang

tenggelam di laut Arufuru, 14 kapal cepat Torpedo kelas P-6, 6 kapal Buru Selam kelas Kraljevica, pesawat pembom jarak jauh Ilyushin IL-28, dan Tank Amfibi PT-76. Dengan kekuatan tersebut pada era tahun 1960-an ALRI menjadi Angkatan Laut terbesar di Asia.

Kapal-kapal yang berasal dari blok timur tidak berusia lama karena adanya perubahan politik mulai tahun 1966 yang lebih condong ke Barat. Secara otomatis dukungan suku cadang menjadi sulit dan mahal sehingga biaya pemeliharaan secara total menjadi besar sementara kondisi keuangan negara juga tidak stabil.

Pada Periode Demokrasi Terpimpin, AURI menjadi sebuah Angkatan Udara paling canggih dan menakutkan di belahan bumi selatan. Kedatangan pesawat-pesawat buatan Uni Soviet seperti MiG-21 Fishbed dan Tu-16 Badger apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini sama dengan apabila Indonesia mengoperasikan pesawat F-35 Lightning II dan B2 Spirit seperti yang digunakan oleh US Air Force (USAF). Kebutuhan Alutsista terjadi karena Indonesia dihadapkan dengan



kekuatan PRRI Permesta di dua tempat sekaligus (Padang dan Manado) namun pengadaan pesawat dari Amerika Serikat tidak bisa terlaksana karena Indonesia terkena Embargo akibat situasi politik yang mendukung Blok Timur. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan Alutsista, pemerintah Indonesia membeli peralatan dari Blok Timur. Selain itu, bantuan juga datang dari China sebagai sikap solider terhadap sesama bangsa Asia yang menawarkan 12 pembom Tupolev Tu-2, 24 Lapovckin La-11 dan 12 jet tempur MiG-17 buatan China tipe 56.

Dijajaran armada helikopter yang mendukung misi *Search and Rescue* (SAR) dan juga tempur terbatas, AURI dilengkapi dengan berbagai Helikopter antara lain UH-34 Choctaw hadiah dari Amerika pada tahun 1960 dan helikopter terbesar MI-6 dari Rusia.

PERIODE ORDE BARU (1966-1998)

Pada era tahun 70-an Indonesia kedatangan panser angkut Personnel LAV 150 Commando dan Commando Scout 150 dan pada dekade 1990-an menerima panser roda ban jenis GIAT VAB, Tank intai ringan Scorpion 90, APC Stormer dan Panhard VBL. Kondisi tersebut tidak lama karena Indonesia terkena Embargo pasca kerusuhan Timor Timur tahun 1998.

Mulai dasawarsa 1980-an kapal-kapal perang TNI AL buatan Eropa Timur yang telah menjadi inti kekuatan TNI AL era 1960 dan 1970-an dinilai sudah tidak memenuhi tuntutan tugas TNI AL. Memburuknya hubungan RI-Uni Soviet pasca pemerintahan Presiden Soekarno membuat TNI AL mengadopsi teknologi Barat diantaranya Korvet berpeluru kendali kelas 'Fatahillah' dari Belanda, Fregat berpeluru kendali kelas 'Van Speijk' eks-AL Belanda, Kapal selam kelas 209/1300 buatan Jerman Barat, Kapal tempur cepat berpeluru kendali kelas 'Patrol Ship Killer' buatan Korea Selatan, dan Pesawat Patroli Maritim 'Nomad-Searchmaster' eks-Angkatan Bersenjata Australia. Pada tahun 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal-kapal perang jenis korvet klas 'Parchim',

kapal pendarat tank (LST) kelas 'Frosch', dan penyaru ranjau kelas Kondo

Bagi Angkatan Udara, pada awal 1970, dikenang sebagai tahun pemusnahan persenjataan Blok Timur sehingga merupakan tahun pacaklik buat kekuatan udara pasca dikandangkannya pesawat Blok Timur yang menggetarkan dunia. Di era itu AURI hanya mempunyai jenis pesawat angkut, latih, dan heli serta beberapa pesawat tempur tanpa gigi selain OV-10F Bronco yang datang di akhir tahun 1976. Angkatan Udara kita yang mendunia terpaksa menerima nasibnya, menjadi kekuatan yang sekadar ada yang hanya mampu menjalankan fungsi angkutan udara. Di tengah keterpaksaan ini, bantuan Blok Barat dalam hal ini Amerika Serikat lewat program *Defense Liaison Group* (DLG),



mengalirlah beberapa jenis pesawat termasuk jenis “tempur” tanpa senjata yaitu 16 unit pesawat T-33A serta 18 unit pesawat F-86 Avon Sabre yang datang dari Australia.

F-5-E/F Tiger II yang tiba di Indonesia tahun 1980 menggantikan F-86 Avon Sabre mampu mengembalikan taring MiG-21F yang disegani era 1960-an. Selain itu datang juga sebanyak 31 unit A-4E (*single seater*) dan dua unit pesawat TA-4 H/*dual seater* pada era yang sama. Selanjutnya jet tempur ringan Hawk 109/209 yang memperkuat TNI AU sejak 1996 merupakan solusi dari kebutuhan akan jet tempur latih yang simple dan praktis. Akhirnya pada tahun 1990 melalui program “Peace Bimasena”, TNI AU mendapatkan pesawat F-16 Fighting Falcon yang berteknologi *full fly by wire* yang dikendalikan komputer serta

kemampuan *dog fight* di udara menjadikan pesawat ini terdepan di kelasnya. Dijajaran pesawat angkut pada era tahun 70-an TNI AU memperbaharui pesawat angkut C-47 Dakota dengan pesawat Fokker F-27 TS (*Troop Ship*) dari Belanda dan pesawat C-130 yang menjadikan Indonesia sebagai operator terbanyak Hercules C-130 di belahan selatan dunia.

Untuk kepentingan operasi TNI juga membutuhkan unsur mobilitas udara dalam menunjang gelar misi tempur. Konsep gelaran berupa UH (*Utility Helicopter*) dipandang yang paling ideal kala itu karena selain mampu mengangkut personel, SAR tempur, drop logistik, dan evakuasi medis, juga dituntut mampu melakukan bantuan tembakan ke permukaan. Untuk menunjang misi tersebut,





ada dua jenis helikopter yang didatangkan pada tahun 1977-1978, masing-masing adalah SA-330 sebanyak 18 unit buatan Perancis dan Bell-205 A-1 untuk Angkatan Darat.

PERIODE ORDE REFORMASI (1998-SEKARANG)

Penataan militer periode ini jauh lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru. Militer tidak lagi menjadi alat politik dan terjadi keseimbangan pembelanjaan anggaran untuk

ketiga Matra. Ancaman yang dihadapi bersifat kontemporer di mana aktor kejahatan bukan berupa negara melainkan berbentuk kelompok ataupun individu serta munculnya *cyber crime*, penyelundupan senjata, perdagangan orang dan obat-obatan serta gangguan keamanan di perbatasan.

Di tahun 2012 Pemerintah Indonesia membeli Sistem Roket Saturasi Artilleri (*Artillery Saturation Rocket System*) yang paling canggih bernama MLRS Astros II buatan Avibras, Brasil. TNI Angkatan Darat juga mendapatkan



sumber: airlines.net

mesin perang baru yaitu *Main Battle Tank* (MBT) Leopard 2 buatan Rheimentall, Jerman yang merupakan tank dengan kemampuan tembak 4 km dengan berat mencapai 62 ton. Pada Tahun 2012 ditandatangani kontrak dengan Nexter, Perancis untuk pembelian ME Armed 155mm Self Propelled Howitzer untuk membentuk dua *Batalion Howitzer Caesar*.

Pada Renstra 2009-2014 Pengadaan Alutsista untuk TNI AL merupakan yang paling besar dalam sejarah Indonesia yakni pengadaan 3 unit Kapal Selam DSME-209

dari Korea Selatan dengan anggaran yang besar. Anggaran tersebut belum termasuk dana untuk mempersiapkan infrastruktur pembangunan Kapal Selam di Indonesia karena di rencanakan 1 dari 3 unit Kapal Selam tersebut akan dibangun di Indonesia.

Untuk kapal perang, TNI AL sedang membeli 2 unit Perusak Kawal Rudal (PKR) Sigma-10514 dari Belanda. Saat ini Angkatan Laut diperkuat dengan 3 unit Kapal Perang *Multi Role Light Frigate* (MLRF) dari Inggris. Pada tahun 2017 akan datang sebanyak 2 unit

Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) SIGMA Class 10514 yang dibuat oleh Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Belanda dan PT. PAL Indonesia (Persero).

Selain itu, untuk kegiatan operasi di laut beberapa unit KCR-40 dan KCR-60 buatan dalam negeri yang dilengkapi dengan rudal yang sangat canggih telah bergabung. Beberapa unit *Landing Ship Tank* (LST) yang bisa digunakan untuk transportasi MBT Leopard akan segera memperkuat TNI AL. Beberapa kapal perang juga telah dilengkapi rudal anti kapal generasi terbaru yaitu Exocet MM-40 *Block 3*. Sebagai kapal pendukung sebanyak 2 unit Kapal Bantu Hidro Oseanografi (BHO) yang merupakan jenis MPRV (*Multi Purpose Research Vessel*) KRI RIGEL-933 dan KRI SPICA-934 mulai bertugas.

Armada Sukhoi yang terkenal dengan manuver cobra secara perlahan memperkuat TNI AU sejak tahun 2003, 2007 dan pada tahun 2012 sehingga genap satu skadron dengan jumlah 16 unit. Selain itu untuk memperkuat Skadron pesawat F-16 A/B Kementerian Pertahanan juga mengakuisisi 24 unit pesawat F16 C/D yang terkenal dengan sebutan Proyek Peace Bimasena II. Pesawat tempur terbaru lainnya adalah satu Skadron EMB 314 Buatan Brazil dan Satu Skadron pesawat tempur T-50i LIFT buatan Korea Selatan. Indonesia juga akan segera dilengkapi helikopter berkemampuan SAR Tempur yakni EC725 *Super Cougar* buatan PT DI bekerjasama dengan *Airbus Helicopter* Perancis. Demikian pula untuk jajaran helicopter TNI AL akan dilengkapi dengan heli AS 565 Panther sebagai Heli Anti Kapal Selam dan TNI AD akan dilengkapi dengan AS 550 Fennec sebagai Heli Serang. Selain itu PT DI juga bekerjasama dengan *Airbus Military* Spanyol untuk membangun pesawat CN-295 untuk TNI AU. Tak ketinggalan pabrikan asal Jerman turut berpartisipasi dalam membangun Angkatan Udara dengan produknya berupa 24 unit pesawat latih Grob G-120TP. Khusus untuk Pertahanan Udara, Indonesia kini telah dilengkapi dengan Senjata Penangkis Udara (PSU) *Oerlikon Sky Shield* buatan Rheinmetall Air Defence Swiss.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam tempo 70 tahun Altisista TNI mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik dari segi jumlah maupun teknologinya yang dipengaruhi oleh tantangan militer yang dihadapi, situasi politik serta kondisi ekonomi. Saat ini bila dibandingkan dengan senjata yang ada di dunia mungkin bukan senjata yang paling canggih yang kita punya, namun diharapkan mampu untuk menghadapi berbagai spektrum ancaman yang dihadapi saat ini. Diperkirakan sampai dengan saat ini pemenuhan kebutuhan Alutsista telah mencapai lebih dari setengah



sumber: garudamiliter.blogspot.com

dari total kebutuhan sesuai *Minimum Essential Force* (MEF) TNI dan diharapkan pada tahun 2024 seluruh kebutuhan tersebut dapat terpenuhi semua.

Hal yang terpenting untuk diingat dan di pertimbangkan serta betul-betul dipersiapkan di masa yang akan datang adalah kita tidak boleh berhenti hanya sampai mampu membeli Alutsista. Namun lebih jauh dari itu kita harus mampu mempertahankan kesiapan tempur Alutsista tersebut sampai berakhir masa usia pakainya. Hal ini hanya akan terwujud apabila kita selalu *catch up* dengan perkembangan teknologi masing-masing Alutsista yang

didukung dengan kesiapan anggaran untuk menjaga kontinuitas aliran logistik pendukungnya. Tanpa dukungan anggaran yang direncanakan sedini mungkin, sangat mustahil Alutsista dapat digunakan pada saat diperlukan. Selain itu pemberdayaan kemampuan nasional dalam mendukung *sustainment* masing-masing Alutsista perlu lebih ditingkatkan lagi dimasa yang akan datang untuk menuju kemandirian.

KUNJUNGAN MENTERI PERTAHANAN KE NATUNA UNTUK MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH TERDEPAN

Oleh:
Budiono
Staf Subbid Pemberitaan Puskompublik Kemhan



Kepulauan Natuna merupakan salah satu kepulauan yang berada di daerah perbatasan yang strategis di ujung utara Indonesia. Laut Natuna juga yang menjadi lintasan utama berbagai jenis kapal asing untuk kegiatan pelayaran dunia, mulai dari kapal niaga, kapal perikanan maupun kapal perang. Luas Kepulauan Natuna yang kurang lebih sebesar 2.631 km² selain memiliki letak yang sangat strategis bagi jalur pelayaran perdagangan internasional juga menyimpan berjuta kekayaan alam.

KUNJUNGAN MENHAN KE NATUNA

Dalam rangka mendukung kebijakan yang diambil pemerintah untuk memperkuat sarana dan prasarana pertahanan negara di wilayah Natuna, pada beberapa waktu yang lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu didampingi sejumlah pejabat Kemhan dan TNI melakukan kunjungan ke Pulau Natuna. Pulau Natuna ini merupakan pulau terluar paling utara NKRI di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.



Kunjungan Menhan yang dilakukan selama dua hari ini dimaksudkan untuk meninjau dan melihat secara langsung bagaimana kondisi Pulau Natuna terutama sarana dan prasarana pertahanan negara disana. Hasil dari kunjungan Menhan ini nantinya akan menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan terkait penguatan pertahanan negara di wilayah Natuna.

Kunjungan Menhan ke Natuna ini merupakan kunjungan pertama kalinya. Dengan menggunakan pesawat Boeing milik TNI AU, Menhan tiba di Lanud Ranai dan disambut oleh Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyjk Pusung dan Bupati Natuna Ilyas Sabli. Kedatangan Menhan ke Natuna disambut dengan tarian repak sirih.

Setibanya di Natuna, Menhan yang didampingi Irjen Kemhan Marsdyo TNI Ismono Wijayanto dan beberapa pejabat Kemhan dan TNI langsung melakukan peninjauan ke beberapa sarana dan prasana pertahanan antara lain fasilitas Pangkalan Udara TNI AU Ranai, Pangkalan TNI AL Ranai, Komando

Distrik Militer (Kodim) 0318/Natuna dan Batalyon Infanteri 134/TS.

Bupati Natuna yang menyambut kedatangan Menhan dan rombongan menyampaikan bahwa masyarakat Natuna merasa tersanjung dan senang hati karena Menhan menyempatkan diri mengunjungi Natuna, walaupun letaknya yang sangat jauh berada ada di ujung utara.

Lebih lanjut Bupati Natuna menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna bersama dengan unsur masyarakat dan DPRD senantiasa mengejar ketertinggalan pembangunan dari kabupaten-kabupaten yang lainnya. Natuna yang saat ini sudah berusia kurang lebih 16 tahun berupaya terus menggalakkan pembangunan dan masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan serta perlu dibangun.

Kabupaten Natuna terdiri dari 12 kecamatan: 70 Desa dan 6 kelurahan yang menyebar di 154 Pulau yang ada di Kabupaten Natuna. Diantara 154 pulau tersebut, hanya 27



pulau yang berpenghuni, yang lainnya masih kosong. 97,5 persen wilayah Natuna adalah lautan.

Dalam kegiatan pembangunan, Pemda Kabupaten Natuna selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik bersama seluruh unsur pimpinan daerah terutama pihak TNI AU, Kodim, Polres dan jajaran lainnya. "Kami dengan suasana akur, akrab dan penuh kebersamaan dengan situasi cukup nyaman, aman dan damai. Dalam hal keamanan kami bersama selalu menjaga masyarakat dengan penuh kebersamaan dan keakraban" kata Bupati.

PERKUAT SARANA DAN PRASARANA PERTAHANAN NEGARA

Sementara itu, Menhan menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kemhan akan memperkuat sarana dan prasarana pertahanan negara di wilayah Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kemhan akan melengkapi kepulauan Natuna dengan membangun pelabuhan untuk Pangkalan TNI AL dan memperlebar landasan pacu Pangkalan TNI AU.



Kemhan juga akan menempatkan pesawat tempur, menambah sejumlah kapal perang dan kapal-kapal patroli guna mengamankan wilayah Pulau Natuna dari kejahatan laut dan pelanggaran wilayah NKRI. "Kemhan akan menempatkan pesawat tempur disini (Natuna) dan kapal-kapal tempur disini dan radar yang lebih terbaru dari yang sekarang ini dan kemudian *drone*", ungkap Menhan.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, bahwa peningkatan sarana dan prasarana pertahanan negara di wilayah Natuna adalah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Natuna sekaligus juga memberikan aman kepada rakyat Indonesia. Selain itu, jumlah personel TNI juga akan ditambah hingga dua ribu personel untuk menjaga perairan Natuna. Penambahan personel TNI antara lain berasal dari sejumlah pasukan elit di tubuh TNI, seperti Korps Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara, Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan Raider TNI Angkatan Darat. "Kita tidak hanya menambah Alutsitanya di wilayah Natuna, namun jumlah personel TNI akan ditambah," jelas Menhan.

Menhan menambahkan, kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pertahanan negara di Natuna juga diharapkan akan berdampak pada sektor pembangunan dan ekonomi. Rakyat Natuna diharapkan akan merasa aman dan nyaman dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. "Alutsista ditambah maka pasukan juga akan bertambah, sehingga Natuna tambah aman dan juga perputaran ekonomi akan bertambah, karena paling tidak ada 2000 pasukan disini", jelas Menhan.

Selain itu, untuk memperkuat pertahanan negara di wilayah Natuna,

Kemhan juga berencana akan memberikan pembekalan pengetahuan kepada penduduk Natuna yang berjumlah 85 ribu jiwa, sehingga memiliki rasa cinta terhadap tanah air.

MENYEMPATKAN DIRI KUNJUNGI PULAU SEKATUNG, PULAU TERDEPAN BERHADAPAN LANGSUNG DENGAN LAUT CHINA SELATAN

Dalam rangkaian kunjungannya ke Natuna ini, Menhan juga menyempatkan diri melakukan peninjauan ke Pos Pengamanan Perbatasan dan Pulau Terluar di Pulau Sekatung. Pulau Sekatung merupakan pulau terdepan yang berbatasan dengan Vietnam dan berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Secara administratif, Pulau Sekatung masuk dalam wilayah Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Pulau Sekatung merupakan pulau terluar tidak berpenghuni yang berada di bagian utara Kepulauan Natuna. Pulau Sekatung berada di sebelah utara Pulau Laut dan termasuk dalam 12 pulau terluar yang memerlukan penanganan khusus.

Di Pulau Sekatung ini, Menhan disambut oleh para Prajurit TNI dari Brigade Marinir 8 Brandan Medan dan Yonif 134 Reider Batam yang sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan. Hadir pula menyambut Menhan, Camat Pulau Laut Anrizalzen, ST beserta jajaran unsur Muspida Kecamatan Pulau Laut.

Selain memberikan pengarahannya kepada para Prajurit TNI. Menhan juga berdialog dengan Camat Pulau Laut beserta jajaran Muspida serta masyarakat Pulau Laut yang letaknya bersebelahan dengan Pulau Sekatung.

Beberapa hal disampaikan Menhan kepada para Prajurit dalam kesempatan tersebut antara lain, Menhan menyampaikan ucapan terimakasih kepada para Prajurit yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Menhan berharap sisa tugas yang ada harus

dilaksanakan dengan baik dan semangat tidak boleh turun.

Menhan juga menyampaikan pesannya kepada para Prajurit untuk selalu siap, siaga dan waspada. Dalam bertugas para Prajurit juga diminta untuk senantiasa menjaga dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya, serta mengajak atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan agar terus tertanam rasa cinta kepada tanah air dan negaranya.

Selain itu, para Prajurit juga diminta untuk selalu menjaga kekompakan dan senantiasa baik-baik dengan rakyat. Karena mempertahankan bangsa dan negara ini tidak bisa hanya TNI sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan rakyat.

Dari hasil kunjungannya di Sekatung ini, Menhan merasa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti persediaan air bersih, listrik dan pembangunan barak bagi prajurit yang bertugas di Pospamtas Pulau Sekatung. Menhan berjanji akan memperbaiki *sollar cell* di sana yang kadang rusak, selain

membangun dua barak dan aula, termasuk pos penjagaan di Pospamtas itu. Menhan mengakui jaringan komunikasi bagi pengguna telepon seluler masih mengalami kendala karena tidak ada menara, namun jaringan komunikasi untuk militer tidak bermasalah.

Menhan berjanji akan berkoordinasi dengan Menhub agar memperhatikan masalah ini. "Perhatian terhadap masalah jaringan komunikasi ini, tak hanya di Natuna saja, melainkan di setiap perbatasan, seperti Kalimantan dan Papua," kata Menhan.

Kedepan, pemerintah Indonesia diharapkan terus memperkuat pertahanan negara di sekitar kawasan Natuna, baik dengan menambah Alutsista TNI maupun penambahan kekuatan personelnya serta penguatan kesadaran bela negara masyarakat Natuna. Dengan demikian Indonesia benar-benar memiliki kekuatan pertahanan yang cukup mumpuni sebagai *effect deterrent* untuk menjaga kedaulatan Indonesia khususnya di sekitar Kepulauan Natuna dari kemungkinan buruk ancaman konflik besar yang kapan saja bisa terjadi di masa mendatang.





**POS PULAU SEKATUNG
NATUNA**

**DIREKTORAT JENDERAL
POTENSI PERTAHANAN
KEMHAN**



KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dirjen Pothan dipimpin oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan disebut Dirjen Pothan. Dirjen Pothan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dirjen Pothan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang potensi pertahanan nir militer;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan nir militer meliputi kesadaran bela negara, komponen cadangan, komponen pendukung, pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta pembinaan veteran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi pertahanan nir militer;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi pertahanan nir militer; dan
- e. pelaksanaan administrasi Dirjen Pothan.

STRUKTUR ORGANISASI

Dirjen Pothan terdiri atas Sekretariat dan lima Direktorat:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Set Ditjen menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen;
- b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen;
- c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; dan
- d. koordinasi dan supervisi staf.

Set Ditjen terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan
- b. Bagian Data dan Informasi
- c. Bagian Umum
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Direktorat Bela Negara.

Direktorat Bela Negara selanjutnya disebut Dit Belneg adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Pothan dipimpin oleh Direktur Bela Negara disebut Dir Bela Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kesadaran bela negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Belneg menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara;
- b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerjaan;
- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerjaan;
- d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerjaan; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Belneg.

Dit Belneg terdiri atas:

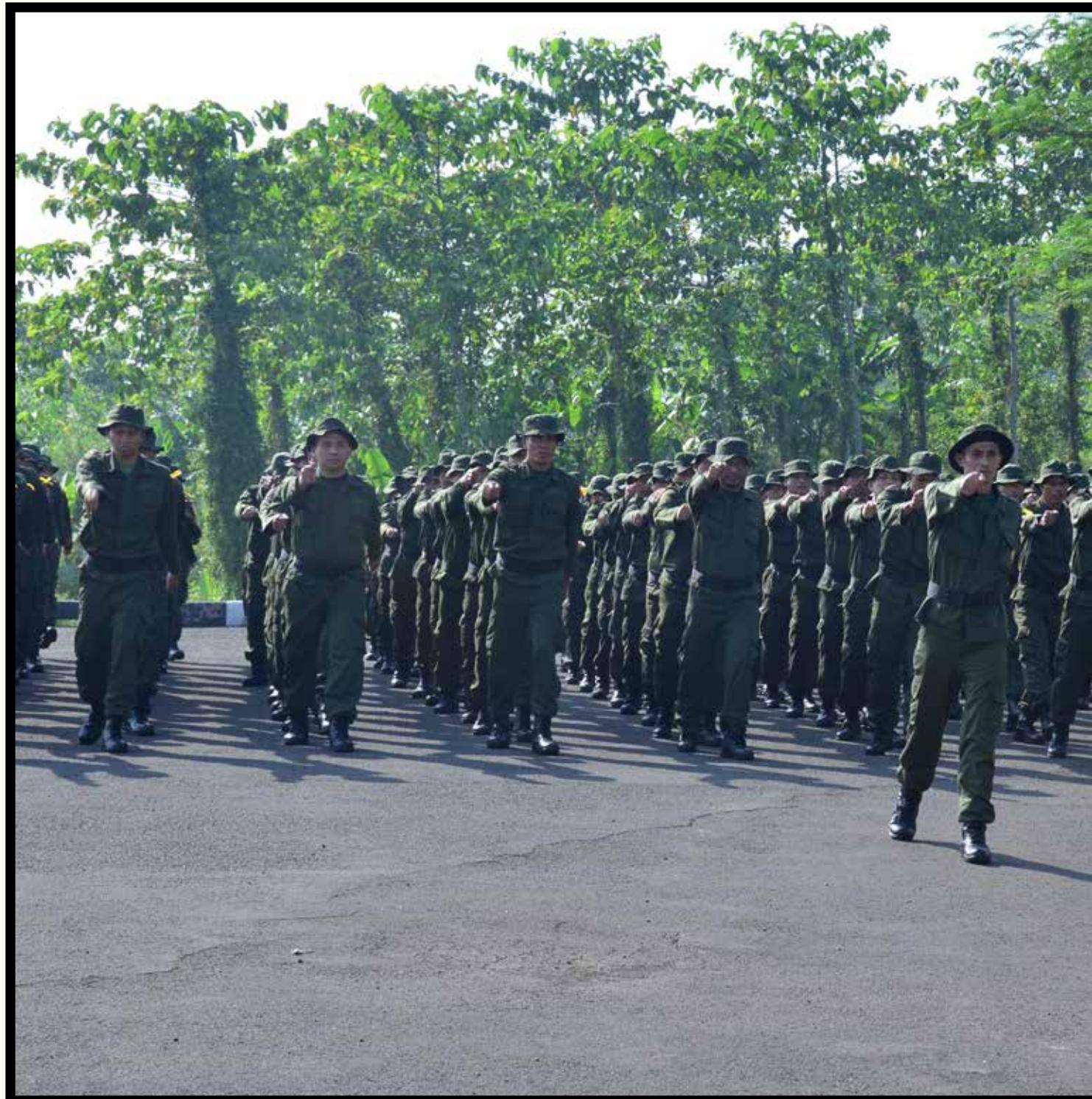
- a. Subdirektorat Lingkungan Pendidikan
- b. Subdirektorat Lingkungan Pemukiman
- c. Subdirektorat Lingkungan Pekerjaan
- d. Subbagian Tata Usaha
- e. Kelompok Jabatan Fungsional





3. Direktorat Komponen Cadangan.

Direktorat Komponen Cadangan selanjutnya disebut Dit Komcad adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Pothan dipimpin oleh Direktur Komponen Cadangan disebut Dir Komcad mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan.



Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Komcad menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan;
- b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan matra darat, laut dan udara;
- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan matra darat, laut dan udara;
- d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan matra darat, laut dan udara; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Komcad.

Dit Komcad terdiri atas:

- a. Subdirektorat Matra Darat
- b. Subdirektorat Matra Laut
- c. Subdirektorat Matra Udara
- d. Subbagian Tata Usaha
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Direktorat Komponen Pendukung.

Direktorat Komponen Pendukung selanjutnya disebut Dit Komduk adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Komponen Pendukung disebut Dir Komduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan dan pembinaan komponen pendukung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Komduk melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan Komponen Pendukung;





- b. perencanaan standardisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana komponen pendukung;
- c. pembinaan bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana komponen pendukung;
- d. pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana komponen pendukung; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Komduk.

Dit Komduk terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sumber Daya Manusia
- b. Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Buatan
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana
- d. Subbagian Tata Usaha
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan.

Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan selanjutnya disebut Direktorat Tekindhan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan disebut Dir Tekindhan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, pengembangan teknologi industri pertahanan, perizinan serta evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Tekindhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan;
- b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang teknologi pertahanan, pendayagunaan industri, industri pertahanan, industri nasional dan administrasi teknologi;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang teknologi, industri pertahanan, pendayagunaan industri, dan perizinan serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan;



- d. pelaksanaan pengembangan teknologi industri pertahanan, pendayagunaan industri serta tata kelola dan pengembangan sistem serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan;
- e. Pendataan ofset pertahanan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan guna mendukung kemajuan industri Pertahanan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Tekindhan.

Dit Tekindhan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi Pertahanan
- b. Subdirektorat Industri Pertahanan
- c. Subdirektorat Pendayagunaan dan Kerjasama Industri Pertahanan
- d. Subdirektorat Perizinan
- e. Subbagian Tata Usaha
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Direktorat Veteran.

Direktorat Veteran selanjutnya disebut Dit Vet adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Veteran disebut Dir Vet mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keveteranan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Vet melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keveteranan Republik Indonesia;
- b. penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang komunikasi sosial, pendataan dan administrasi veteran Republik Indonesia, terdiri dari administrasi pemberian tanda kehormatan veteran RI dan hak-hak veteran RI berupa tunjangan veteran, dana kehormatan veteran RI dan tunjangan janda, duda, yatim piatu veteran RI;
- c. pemberian bimbingan dan supervisi teknis di bidang komunikasi sosial, pendataan dan administrasi veteran Republik Indonesia, terdiri dari administrasi pemberian tanda kehormatan veteran RI dan hak-hak veteran RI berupa tunjangan veteran, dana kehormatan veteran RI dan tunjangan janda, duda, yatim piatu veteran RI;



- d. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang komunikasi sosial, pendataan veteran RI dan administrasi veteran, terdiri dari administrasi pemberian tanda kehormatan veteran dan hak-hak veteran Republik Indonesia berupa tunjangan veteran, dana kehormatan veteran dan tunjangan janda, duda, yatim piatu veteran; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Vet.

Dit Vet terdiri atas:

- a. Subdirektorat Komunikasi Sosial
- b. Subdirektorat Administrasi Veteran
- c. Subdirektorat Data
- d. Subbagian Tata Usaha
- e. Kelompok Jabatan Fungsional









www.kemhan.go.id
www.dmc.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WiRA

Volume 57 / No. 41 / November - December 2015

CIVIL-MILITARY COOPERATION A Lesson Learned from Paris Tragedy

UNDERSTANDING THE STATE
DEFENSE

PATTERNS OF MIGRATION
RADICALISM NOTIONS
AND DEFENSE STRATEGY

INDONESIA'S MAIN WEAPONRY
SYSTEM IN 70 YEARS

VISIT OF THE MINISTER OF DEFENSE TO NATUNA
FOR STRENGTHENING THE STATE DEFENSE
IN THE FOREMOST REGION

UNIT PROFILE:
DIRECTORATE GENERAL OF DEFENSE POTENTIAL

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

ENGLISH



**THE MINISTER OF DEFENSE AND THE STAFF OF
THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**WISH
MERRY CHRISTMAS
AND
HAPPY NEW YEAR
2016**

Editorial

Dear Readers,

Wira Editorial team brings you its final edition of the year, November-December edition. The team put forward an article about Understanding the State Defense and then from Mr. Sjaafrie Sjamsoeddin a former deputy ministry of defense about Civil-Military Cooperation (A Learned from Paris Tragedy), furthermore we also present Patterns of Migration, Radicalism Notions and Defense Strategy, Indonesia's Main Weaponry System in 70 Years, The Visit of the Minister of Defense to Natuna for Strengthening the State Defense in the Foremost Region. We also present the profile of Directorate General of Defense Potential.

Dear Readers,

To enrich the WIRA magazine, we always expect the participation all readers to send articles, opinions, feedbacks or critic and suggestions. For those who want to have this magazine could contact us via email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed online at the www.dmc.kemhan.go.id.

Hopefully WIRA magazine November-December 2015 edition can benefit us all.

Contents

EDITORIAL BOARD

Advisor:

Minister of Defense
General (Ret.) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD
Lt. Gen. Ediwan Prabowo, S.IP

Editor in Chief:

Head of Public Communication Centre
of MoD
Brig. Gen. Djundan Eko Bintoro, M.Si
(Han)

Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public
Communication Centre
Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

Editor:

Ltc. Joko Riyanto, M.Si.

Mutiara Silaen, S.Ikom, M.AP

Graphic Design:

1st Lt. Farah Merila S, S.Kom.

Eko Prasetyo, S.Kom, M.AP

Imam Rosyadi

Photo:

Photografer of Public Communication
Centre of MoD

Sirculation:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Published by: Public Communication Centre
of MoD, Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

UNDERSTANDING THE STATE DEFENSE



"Indonesia is my homeland and I will defend it all the time." That slogan – or words of wisdom – is often displayed in various banners as well as mentioned in many seminars and discussions.

CIVIL-MILITARY COOPERATION A Lesson Learned from Paris Tragedy



The world was stunned by what just had happened in Paris, France. The Friday night terror attack has tragically ruined people's happy weekend with seven locations simultaneous cruel attacks. On that black Friday, at least 132 people were killed and hundreds of people were injured - some of them were reported to be still in a very critical condition.



PATTERNS OF MIGRATION, RADICALISM NOTIONS AND DEFENSE STRATEGY

Indonesia with its 252,37 million population (Data from BPS 2015) has experienced many changes in its day-to-day life. Indeed, social dynamics in developing country are inevitability that cannot be avoided.



INDONESIA'S MAIN WEAPONRY SYSTEM IN 70 YEARS

A nation's military history is inseparable from the history of the nation itself. So is the main weaponry system owned and operated by the Indonesian Armed Forces. It's significantly developing and adjusting to the threats being faced at that time.



VISIT OF THE MINISTER OF DEFENSE TO NATUNA FOR STRENGTHENING THE STATE DEFENSE IN THE FOREMOST REGION

Natuna Islands is one of the islands located at the strategic border in the far north of Indonesia. Natuna Sea is the main line of various foreign ships for world sailing activities, from commercial ships, fishing ships, to war ships.



DIRECTORATE GENERAL OF DEFENSE POTENTIAL

Ditjen Pothan, is executing elements of tasks and functions of defense under and responsible to the Minister. *Ditjen Pothan* is led by the Director General of Defense Potential (*Dirjen Pothan*) whose task are to formulate and implement policies and technical standardization in non-military defense potential.

UNDERSTANDING THE STATE DEFENSE

By:
EDITORIAL TEAM



"Indonesia is my homeland and I will defend it all the time." That slogan – or words of wisdom – is often displayed in various banners as well as mentioned in many seminars and discussions. However, those words should not only become an empty slogan on ornamental backdrop in various events but they should be an encouragement for citizen's participation in country development.

The spirit of state defense should be embedded in all Indonesian citizens and it should be applied in everyday life. Awareness and pride of being Indonesian that mirrored in daily life actions whatever one's profession might be reflected in Indonesia's sovereignty and its welfare. Therefore, the state defense awareness is the essential part in our nation's sustainability.

The date - 19 December - has been set as the state defense day. Its commemoration

is a reminder of the struggle in maintaining Indonesian independence. It is also a reminder of responsibility and commitment to defend the Unity of Indonesia, as well as the needs of huge effort to transmit Indonesia to reach its glory.

HISTORY OF THE STATE DEFENSE DAY

The state defense day has been stipulated on Presidential Decree (Kepres) Number 28 of 2006 on State Defense Day. It contains: 1) 19 December is stipulated as State Defense Day; 2) The State Defense Day is not a holiday. Establishment of that commemoration day has its own purposes. The enactment of 19 December as the State Defense Day could be traced back to 19 December 1948 when Emergency Government of the Republic

of Indonesia (PDRI) led by Mr. Sjafruddin Prawiranegara was established in West Sumatra to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. It was during the time when our national heroes have risked their body and soul to preserve the existence of the Unitary state of the Republic of Indonesia (NKRI) against the Dutch Military Aggression II.

On that time, the Netherlands had denied the Renville agreement and attacked Yogyakarta - the former capital city. They captured Soekarno and Hatta, and then declared to the world that the Republic of Indonesia had been finished. On 19 December 1948, the Netherlands repeatedly broadcasted the news that Indonesia had been dispersed while the leaders such as Soekarno, Hatta, and Sjahrir had been detained.

Upon hearing the news that Dutch had occupied Yogyakarta and captured most of the head of the Government of the Republic of

Indonesia, on December 19, in the afternoon, Mr. Syafruddin Perwiranegara with Col. Hidayat – the Army and Territory Commander of Sumatra - visited Mr. Teuku Mohammad Hasan – Governor of Sumatra/ Chief Commissioner of the Central Government - in his residence and conducted some negotiations. In that meeting, it was decided to establish the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) and appointed Mr. Sjafruddin Prawiranegara as the head of the Emergency Government. The establishment of the Emergency Government was very important to show the world that the Republic of Indonesia was still existed. If there was no PDRI, then the Government of the Republic of Indonesia was not legally existed since Indonesian leaders such as Soekarno and Hatta were detained in two separate places in Sumatra.

The Dutch attacks eventually gave way to international reactions. The world had accused the Dutch that they had committed



an aggression towards a sovereign country, thus violating the principle of mutual respect of countries' sovereignty as stipulated in the United Nations (UN) Charter.

STATE DEFENSE AND THE PERCEPTION OF THREAT

The state defense awareness is an essential thing. It should be possessed by every Indonesian citizen for their implementation of state defense rights and obligations. State defense awareness is the primary capital as well as our nation power to maintain integrity, sovereignty and survivability of our country and nation.

Indonesia as a nation has not only had to face challenges in politics, security and economics fields, but also in managing its diversity. Diversity and pluralism can become powerful force if one able to manage. However, many nations had been divided for their incapacity of managing diversity. Therefore, not only Indonesia has to have human resources that mastering science and technology, but also with great mental quality, full of nationalism and patriotism. Therefore, state defense awareness is essential to be embedded in attitudes and behaviors of the citizen. It is a real form of mental revolution as well as developing effort to build up deterrent power in facing the complexity dynamics of national security.

The Minister of Defense in various occasions always reminds us about the visible threats and invisible threats. The visible threats are those that we are currently facing and can occur at any time, as well as give impacts on national security, such as terrorism, radicalism, separatism, insurgencies and natural disasters. On the other hand, the invisible threats are conflict or conventional war in which we have to face the power of the main weaponry defense system of other countries.

The world has just been rocked up by terrible terror bombings in Paris and several other places all over the world. Likewise, the phenomenon of ISIS and radicalism currently threaten national security of many countries. Responding to the rapid development both regionally and globally, as well as many



potential threats, Indonesia should undertake anticipatory steps in preparing its human resources. The anticipatory measures are through advocacy efforts that involved all components of the nation by instilling state defense values. The state defense values should be implanted as early as possible to every citizen in order to increase awareness and ability of state defense.

STATE DEFENSE CONCEPT

State defense concept is in accordance with 1945 Constitution – it is right and obligation of the citizen, as in accordance to Article 27 Paragraph 3 that states, “every citizen has right and obligation to participate in state defense efforts. In addition, Article 30 paragraph (1) states, “that every citizen has right and obligation to participate in state defense and security”. Likewise in Law Number 3 of 2002 on National Defense, it is stated that state



defense efforts are attitudes and behaviors of all citizens inspired by love to the Homeland based on Pancasila and 1945 Constitution.

State Defense awareness is built through state defense awareness training programs that is a part of continuous human resource development for having values of: Love the Homeland, Having awareness towards nation and state, Believe Pancasila as the state ideology, Willing to sacrifice for the nation and the state, Having the ability of state defense. The Implementation of sowing the values of patriotism, love of the homeland and the spirit of state defense should be carried out with full awareness, responsibility and willingness to sacrifice for the country. Human resource development should also be adjusted to dynamics in situation and condition of the life of society, nation and state so that all citizens can be the component of the nation's deterrent power to support national defense.

Fostering awareness of state defense is an integral part of the implementation of national development, and it is not solely the responsibility of the Ministry of Defense per se, but rather a shared responsibility based on basic obligation and honor of every citizen. On that basis, education and training of civil defense for all citizens is an essential thing and cannot be negotiable. State Defense Education is considered as relevant and strategic in state defense development, as well as useful to improve the understanding and cultivation of patriotism and love of the homeland. Thus, the awareness of nation and state that based on the concept of nationalism should be continued being cultivated to all Indonesia people.

THE MINISTRY OF DEFENSE FORMS 100 MILLION CADRES FOR STATE DEFENSE

The state defense tasks is not only the responsibility of the TNI, but involves the entire community such as teachers, midwives, health-workers, farmers, workers, professionals, civil servants, traders, and other professionals. Therefore, togetherness and cohesiveness is indispensable, and it can only be achieved if there is a clear understanding of roles and functions of each functions and the impact in strengthening the unity of the nation.

In order to implement the rights of citizens in state defense, the government through the Ministry of Defense has organized state defense cadre formation. This program is aimed to sow patriotism, awareness of Indonesia as state and nation, loyalty towards Pancasila as well as willingness to sacrifice for the nation values. Furthermore, these cadres are expected to disseminate state defense values to people in their environment.

Based on that, the Ministry of Defense has held a Coordination Meeting with Local Government Association to build up state defense cadres in 2015. That coordination meeting was a follow up from state defense national movement that had been proclaimed by the President on the commemoration of state defense day on 19 December 2014. That coordination meeting was resulted in a Memorandum of Understanding on the

establishment of state defense cadres in districts/cities, and it was signed by the Ministry of Defense, the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs, Ministry of Interior, Ministry of State Employees Empowerment and Bureaucratic Reform, the Ministry of Culture and Primary and Secondary Education, Ministry of Research and Technology and Higher Education, Ministry of Religious Affairs, Ministry of Youth and Sports, Police Institution, TNI and National Scouts Organization.

The Ministry of Defense in cooperation with related ministries/institutions will continue

to form state defense cadres in the next five years in every districts/cities throughout Indonesia. Throughout 2015, those activities have been realized by state defense awareness programs that have been done in 45 Districts/Cities under 11 military area command. The 100 million Cadre Program is a part of "Mental Revolution" efforts under Nawa Cita Program of the Working Cabinet and in order to establish Human Resources that has nationalism, patriotism and state defense awareness attitudes.





CIVIL-MILITARY COOPERATION

A Lesson Learned from Paris Tragedy

By:

Sjafrie Sjamsoeddin



The world was stunned by what just had happened in Paris, France. The Friday night terror attack has tragically ruined people's happy weekend with seven locations simultaneous cruel attacks. On that black Friday, at least 132 people were killed and hundreds of people were injured - some of them were reported to be still in a very critical condition. Sympathy has poured in from around the globe. The world leaders denounced that extremely inhumane attack where a group of people shooting blindly to the masses and several even blew up themselves.

These days, we can see various global phenomena causing crisis situation. There are many different interpretations on crisis as well. Simply put, a crisis is an emergency situation that creates damage and requires quick action in both macro and micro scales to address it. Crisis might be occurred due to human engineered activities or naturally caused event. These notions in crisis management are usually refer in the remark: "Threat is real, but when?" Not all threats can be prevented, however they must be addressed with immediate quality actions of adequate

quantity. In the lesson learned, only country with sufficient alertness with solid planning and preparation that incorporating strict control is the one that would be able to act quietly and quickly in responding to a crisis.

NON-STATE ACTORS

The Paris tragedy has opened global eyes and minds that the world faces threats not only from state actors, but also from non-state actors. The perpetrators of terror attacks in Paris did not belong to any country armed forces, but only a group of armed people. The current and future global challenges indicate that the world cannot be separated from political and economic uncertainties. There are global political interests and shifting economic power that might cause huge negative effects for some countries. On the other side in strategic study, the shifting military power from mass destruction weaponries has turned into advanced technology dissemination intensity of manned and unmanned system operated by unconventional asymmetric warfare.

Meanwhile, the new information technology war has appeared due to development of hackers (Cyber Armies) competencies. This condition is popularly referred as Cyber War. The other strategic phenomena that should be counted in are corruptions and disloyalty towards national integration of plurality characteristic. The global crisis observed shows that the dominant factors covers geopolitical influence, power, interest and culture. In responding to those factors, Indonesia needs a collective response attitude in order to protect country, that is hand-in-hand civil-military relationship.

CIVIL-MILITARY INTERACTION

Civil-military interaction has become a worldwide problem solving in tackling humanitarian and state survivalist problems. It also has been strategic solution in the era of democracy. For example, we can see how France handled the recent terror attacks with 1.500 military troops deployed directly to address the situation. The same thing has happened in the United States during 11 September 2001 terror



source: hatree.com



attacks and 2005 Katrina Hurricane in New Orleans. Civil authorities handled those crises, yet the activities were also involved military personnel. Federal Emergency Management Agency of the United States is a state agency that works across sectors to handle all crisis situations occurred in the country. Mutualism approach, interdependence, as well as individual and institutional consultation have become preventive characteristics built up within the framework of civil-military cooperation. Civil-military interaction acknowledges three elements: first, capacity information exchange; second, team building and cross training of civil and military sectors; third, preparing a joint program. Universally, there are two types of civil-military cooperation

in mission. In a humanitarian mission, it is referred as humanitarian action; while in state political mission, it is referred as military action. The deployment of military forces is under political authorization of applicable sovereign civil authority in the scope of military deployment in stabilization area as well as crisis reconstruction area. Civil expertise capability is very dominant in civil-military interaction. Rapidly developed civil profession area appears in various aspects, such as mastery of hardware and software technology, medical, legal, environmental management, business economics, and information technology. Military role has ultimate ratio characteristic - not the final determinant but a major state element to save and to maintain the survivability nation



source: news.liputan6.com

and state in crisis situation. Therefore, the assignments given really need a specific time frame and clear assignment-scale, since professional military has to be neutral and impartial in the mission.

COOPERATION SPECTRUM

Political will is needed to formulate concept of integrated strategy in the operation of civil-military cooperation in crisis management. Civil professional technocrats will work hand-in-hand with military personnel in joined mission to respond crisis. The dominant factor such as

parliamentary control and regulation strategic direction is necessary to legitimize civil-military cooperation. In the era of civil society, both present and future, civil-military cooperation occupies a vast space. Indonesia has built a road map of mutual cooperation and has revitalized military's role. It should not stop at that point, but systematic optimization by the state should be continuously done. We should not be constrained by psychological and traumatic factors, but be more wisely in reading the need of national integration to face future challenges.

The essence of any crisis management is leadership and integrated yet controlled management. The important factor in crisis management is the ability to take quick decisions in order to overcome the crisis by using resources and capabilities of the military

power. All crisis-supporting units should be quickly mobilized to the crisis area. Information is the dominant fact in crisis management to anticipate, plan, and control the crisis. Information on critical infrastructure that has vital and strategic value should become important part in the management to anticipate terrorist attacks. Several terror attacks have been occurred due to failure of precaution in identifying and safeguarding the area. In information technology sector, Indonesia has already had a wide range of advanced technologies. Yet, for effectiveness, we also need the support of traditional resources that is known as territorial development. The territorial development personnel are the first source of information needed for quick responses.

The lesson learned also had shown that crisis management needs support from media operation management. The media also need to obtain as much as real time information. However, the media also cannot be separated from making sensation during humanitarian tragedies and civilian casualties, therefore, crisis management personnel should work carefully. Public facilities such as schools and hospitals as well as basic needs of the society will be very much on media attention, hence need prioritized handling. In my opinion, crisis management center also needs to establish IBO (Image Building Operation) that provide information continuously. One also should not overlook the cyber threat. Cyber threats are not lethal but able to incapacitate the state system.

Since Cyber War knows no limit nor time, international organizations such as NATO needs to take initiatives to design international cyber defense. In Indonesia, the interaction with the hackers has been done to respond the necessity of Cyber War defense center. There is a need to design an integrated cyber defense strategy in order to safeguard national interests.

PATTERNS OF MIGRATION, RADICALISM NOTIONS AND DEFENSE STRATEGY

By:

Prisca Delima

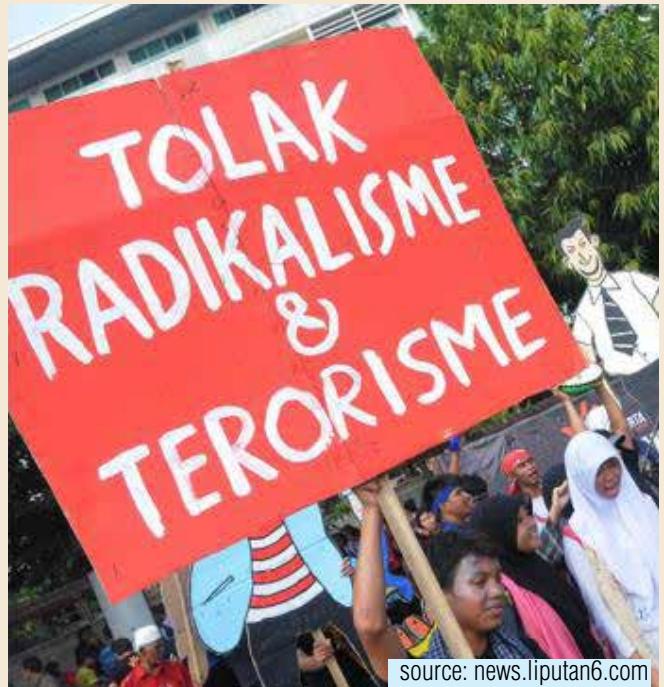
(Academian and researcher in Peace and Conflict Resolution Study Program - IDU)

RADICALISM NOTIONS

Indonesia with its 252,37 million population (Data from BPS 2015) has experienced many changes in its day-to-day life. Indeed, social dynamics in developing country are inevitability that cannot be avoided. Following the dynamics then possibly come many radicalism notions either noticeable or not-too-visible. No matter it is stated that Indonesia is a secular country by its constitution, refuge behind the religious radicalism has been known existing in our society for ages.

Even though that notion might be small in scale, various radical groups have had and might give another try in the future to create havoc in a supposedly peaceful society of Indonesia. Religious and social freedom might be used intentionally to introduce and to strengthen those radical existences. But, whether freedom can be treated as the culprit in the spreading of radicalism notions or not, the debates can go on and on.

If we are being honest, the current issues on ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) movement in Indonesia, not a form of radical movements under the guise of religion. There are other basic and more structured reasons behind them and such a list can go on forever. Any other way, prosperity gaps and dissatisfaction towards current economic and social conditions have led many Indonesian submitted and being seduced for joining ISIS missions. Either those who come from Moslem background or suddenly-converted-to-Moslem, many have been captivated by the idea of serving ISIS. The promises of better economic and spiritual conditions stated in advertisements of many forms then blinded any other logical explanations.



source: news.liputan6.com

PATTERNS OF MIGRATION IN INDONESIA

Indonesia has undergone a major shift in patterns of human settlement in these past decades. Migration and population mobility that very much related with policies on migration, decentralization as well as socio-economic development have had their marks in the population dynamics.

High growth in urbanization due to development as well as creation of new administrative area in order to boost economic development had also played their parts. Beside that, the facts have shown that several clustered area whose predominantly income comes from its residents who works overseas, had been recognized as the area in which radicalism seeds grows fertilely.

Since Indonesian people in many locales faithfully listen to their religious leader, then radical religious leaders (Moslem and

Non-Moslem) also spread their radicalism agenda as a kind of blessed movement.

Migration of thoughts, ideas, and discourses of radicalism then would be spread out by the locals in their internal migration in their mobility within the country. In addition to such migration, to be crossing paths in international migration streams that linked conflict areas in Middle East and South Asia to other destination countries that considered "safe" countries, then the spread of radicalism notion brought by these kind of migrants is really another matter that should be taken into consideration other than humanitarian issues. As an open country with many entry-access coupled with limited monitoring and control, the coming-in-migration as well as the internal migration within the country have indeed spreading radicalism notions throughout the country by far and easy.

Eventhough the awareness of radicalism notions have been pretty much around,

including the discourses of how it should be recognized and controlled; yet the conditions needs to be formulated comprehensive effort. Indonesia pretty much leaves its people on their own devices in tackling these notions. Limited data and information available on radicalism in Indonesia have made us unsure of the exact number of those who are being carried away and accepting these ideas in everyday life. No statistics have been shown to show the increase in radicalism, yet its voice can be heard in many social media, along with informal as well as formal discussions.

DYNAMICS OF MIGRATION IN INDONESIA

In the past two decades, internal migration had created better redistribution of population in Indonesia. While balanced spatial distribution of population are needed to ensure sustainable and equitable economic



source: news.okezone.com

development, internal migration had also created several social conflicts. No matter how much conflicts are needed to seek balance in the society especially in such a heterogeneous one like Indonesia they are still costly and grab a big portion of funds that should be better used for other necessities such as conflict management, infrastructure development as well as education and health management.

Several areas in Indonesia had shown its distinctive dynamic in the last decade. Centralization and high urbanization in Jakarta in the past had made urban sprawls in Banten and West Java area. However, exploitation of natural resources and boost of development that made high economic growth have led Riau Islands, West Papua, Riau, East Kalimantan and Central Kalimantan into becoming new migration destinations (2015 UNFPA Data). Those demographic data might be indicating susceptibility of these migration-receiving areas. Social conflict warnings might be blinking due to increasing gaps in the society, uneven distribution of wealth between original dwellers and newly comers, as well as increasing rate of radicalism notions that brought in by the newly comers or due to unsatisfactory original dwellers. Poso and Maluku conflicts were proofs of these unintended result and conflict

"mismanagements." It is potential that conflicts will be happened in area with exceptional demographic.

THE URGENCY OF COUNTERING RADICALISM

Looking into the patterns of migration makes us realized that countering radicalism in smart way is an urgent need. Seeds of radicalism have been spread out in unaware manners in these past decades due to failure of our policy-makers and important stakeholders counted in the dynamics patterns of migration and their interaction with social dynamics. Better information infrastructures then should be used smartly in making sure about the security and keep this country intact.

In this information ages, freedom of information is inevitability that we should aware of. Strategically, there is a saying that goes around stated that those who can control the information, therefore controlling the world in which that information is distributed. In this case, it is the state's role to create system that makes countering radicalism becomes possible. Information technology then should be used as means to convey informative message as well as to educate



source: antaranews.com



source: kaskus.co.id

people. Otherwise, usurpers will take over the power over information and tuning it towards unwelcome situations and using it for their own good.

DEFENSE FOR DYNAMICS IN STRATEGIC ENVIRONMENT

As we live in a dynamic world, Indonesia continuously needs to adapt its defense strategy by calculating the dynamics of its strategic environment. The recent downturn regional economic development is also affecting Indonesia uninvitedly. The challenge of good governance and creating harmony in the society will always shadow our continued struggles in adaptability progress while also creating balance in our strategic environment.

Successful defense strategy then should be woven of inter-related workable system from central to the locals. The information system should then ensure security of people, yet limiting access towards the spread of radicalism notions. In this case, the awareness of our territorial borders is not only based on “terra”-lands should be realized even more. The real “territorial” borders of Indonesia mostly

are the imaginary yet existing outlines of our waters surrounded Indonesia archipelago and the space over them. Yet, over these borders people pass during their migration. People might come and go, either with good intentions or not-so-good intentions, either bringing ideas that might be useful to Indonesia or radicalism notions that might rip Indonesia from within.

It is then necessary that defense strategy should be adapted to the pattern of migration, both overseas and internal migration. In this case, the change in demography should also be the basis of our development strategy including defense strategy. Therefore, data in demography and migration pattern dynamics is very crucial for our policy and strategy making. And we do need solid strategy that is really workable - not only for the sake of Indonesia people but also for our land, water (sea), and space.

INDONESIA'S MAIN WEAPONRY SYSTEM IN 70 YEARS

By:

Ltc. Yudi Yuliadi, ST., M. Eng

Staff of Procurement of Defense Facilities Agency

A nation's military history is inseparable from the history of the nation itself. So is the main weaponry system owned and operated by the Indonesian Armed Forces. It's significantly developing and adjusting to the threats being faced at that time. It's therefore interesting to compare the types of weapons that we have based on the periods of the nation's history. It's to add our pride as an Indonesian of what we had and have. The pride will seem real when the system has comparative excellence compared to countries in the region or even in the broader geographical area in Asia Pacific and in the world.

Let's first recall the periods of Indonesia's national history to make a clear standard in seeing development of the main weaponry system. In general, the period of Indonesia's history is divided into.

PERIOD TO DEFEND INDEPENDENCE OR NATIONAL REVOLUTION (1945-1949)

During this period, efforts made by the military were to defend the independence, because despite Proclamation August 17th, 1945, the Dutch didn't recognize Indonesia's



source: garudamiliter.blogspot.com

sovereignty. It only recognized Indonesia's independence on December 27th, 1949. The military threats were quite clear, which were from the Dutch and its allies.

Amidst all limitations, the only source of the main weaponry system was the loot from Japan and the Dutch. For example, mini tanks looted from the Japanese army, universal carriers, M3 Stewart and M4 Sherman armored vehicles looted from the Dutch following the second Military Aggression.

The Indonesian Navy used the main weaponry system as it was, which was rather armed ships instead of war ships. Apart from loot from Japan, there were also ships contributed by the people in general, such as beach patrol wooden ships. The Indonesian Navy's operational condition was really difficult when the security control was handed over from the Great Britain to the Dutch NICA. NICA applied a sea blockade, which reached its peak when the Dutch first Military Aggression partly demolished the Indonesian Navy's main weaponry system, including ships, cannons, mortars, and even the navy base.

A transporting ship of Hj. Siti Hawa was donated to the Indonesian Navy and was named Kapal Kapten Pahlawan Laut. The Navy also bought a coaster wooden ship weighing 160 tonnes from Singapore in 1946, which was then named Gajah Mada-408. It may be the largest ship operated by the Indonesian Navy at that time.

In addition to the wooden ships, there were also Daihatsu-class landing crafts of the former Japanese army weighing 21 tonnes and transport wooden ships, which were named Antareja, Sindoro, Semeru, Diponegoro, and Srikaton sailing boat. Out of the ships in this period, the most sophisticated were 7 units of speed boats purchased from Singapore. The ships were so famous in penetrating the Dutch blockade that one of the speed boats weighing 70 tonnes with a maximum speed of 17 knots, named Outlaw, was nicknamed Black Speedboat by the British and Dutch authorities.

The Air Force was said to have the most numerous main weaponry system. It was quite understandable because since the Dutch colonized Indonesia, airplanes were already

used so that air bases were built throughout Indonesia. The Japanese-heritage aircrafts were stationed in some air bases, including 70 units of Curen in Maguwo, 25 units of Cukiu in Bugis (Malang), 9 units of Nishikoren, 11 units of Nakashima, 4 units of Sansykisen, Mitsubishi K-51, 7 units of Gunteri, 7 units of Sakai, 1 unit of Rokojunana, 1 unit of Shoki-ki 481, 2 units in Morokrembangan, and 11 units of various types of aircrafts in Andir.

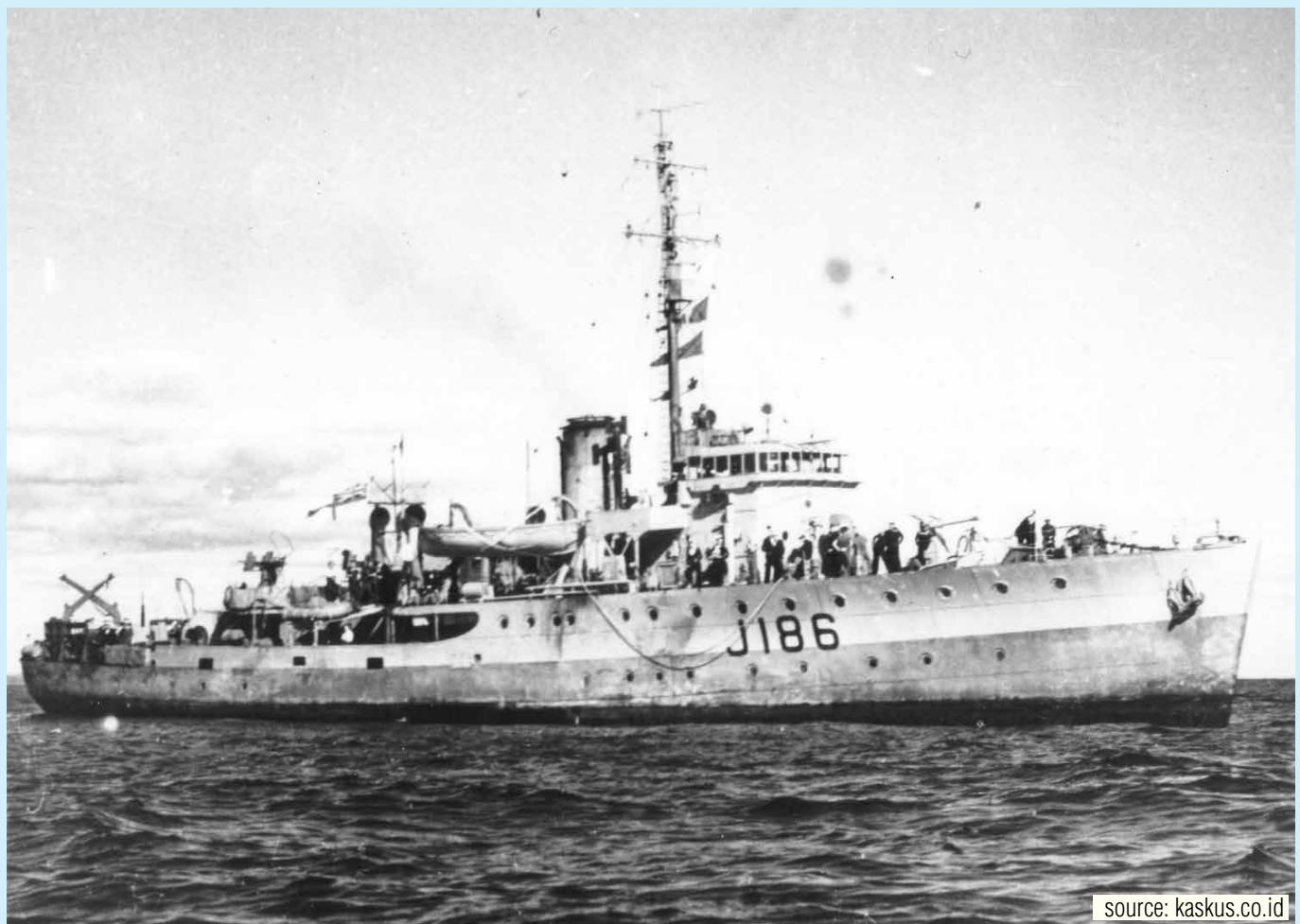
In addition to looted aircrafts, there were also leased and purchased aircrafts, including 4 units of DC-3 Dakota, 2 units of PBY Catalina, 1 unit of Avro Anson, and 1 unit of Stinson L-5.

PERIOD OF LIBERAL DEMOCRACY (1949-1959)

It was a period of the United Indonesian-Dutch Government as result of the Round Table Conference (KMB) and the application of the parliamentary system in Indonesia. The political condition was marked by the frequent changes of the cabinet so that the Indonesian military faced threats of security disturbances such as rebellions almost throughout Indonesia, including DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS movements.

To face such a security situation, land combat operations were in general supported by the former Japanese and Dutch main weaponry system. Meanwhile, for sea combats following the recognition of the Republic of Indonesia by the Dutch, the Indonesian Navy had a main weaponry system from grant by the Dutch or purchased. Two Australia-made Corvet war ships weighing 650 tonnes (Hangtuah and Pati Unus) were submitted by the Dutch to Indonesia as military assistance. Similar ships formerly used by the Great Britain and the Dutch were also handed over in 1950 (Banteng and Radjawali).

Some 25 units of patrol boats or British-made Harbor Defense Motor Launch (HDM) weighing 54 tonnes with a speed of 11 knots, 12 units of Alkai-class patrol ships (143 tonnes, 12 knots), 7 Bango-class patrol ships (194 tonnes, 11 knots), 7 Durian-class patrol ships (90 tonnes), 6 units of Batam-class patrol ships (200 tonnes), were submitted to the Indonesian Navy in 1950s. In addition, there were also



source: kaskus.co.id

Amphibian-typed landing crafts weighing 250 tonnes and transport ships weighing 750 tonnes, minesweepers of 254 tonnes (MMS-type), 4 units of patrol boats weighing 175 tonnes, and 6 Semeru-class mine hunting ships weighing 80 tonnes.

For the Air Force, during this period, the Indonesian aircraft technology shifted from previously Japanese technology to Western technology, including C-47 Dakota, B-25 Mitchell totaling 26 units, B-26 Invader, P-51 Mustang, AT-6 Harvard, PBY-5 Catalina, and Lockheed L-12.

PERIOD OF GUIDED DEMOCRACY (1959-1965)

The Indonesian military was prepared to launch the "Ganyang Malaysia" action. Consequently, military threats to face at that time included Malaysia's military strength and Australia's Special Air Service which assisted Malaysia. In this period, Operasi Trikora took place to free Papua as Indonesia had claimed

that Papua was a part of the sovereign territory of the Republic of Indonesia. On the contrary, the Dutch had claimed that Papua was one of its provinces which would be given independence in 1970. Military threats during Operasi Trikora were therefore the Dutch military.

Since 1960, the Indonesian Army was equipped with EBR/FL-11 Panhard combat vehicles, 475 units of light tanks AMX-13, 55 units of Ferret Mk.2/3, FV 601 Saladin, and 60 units of FV 603 Saracen, the most modern tank at that time. To face a blockage from the west, the Indonesian Army also turned to the east by purchasing BTR 40P, BTR 152 P, and PT-76.

When the country was recovering from a disintegration threat, various combat equipment of the Indonesian Navy from East European countries strengthened the Indonesian Navy and became dominant at that time. Some war machines known in the Indonesian Navy included Sverdlov-class cruisers RI Irian, 8 units of Skory-class destroyers, 8 units of Riga-class frigates, 12

units of Whisky-class submarines, 12 units of Komar-class missiled combat ships, 10 units of Surapati-class fregats, 8 units of Jaguar-class torpedo speed boats, of which KRI Matjan Tutul went down in Arafuru Sea, 14 units of P6-class torpedo speed boats. 6 units of Kraljevica-class hunt submarines, Ilyushin IL-28 long distance bombers, and Amphibian Tanks PT-76. Having such strength in 1960s, the Indonesian Navy was Asia's largest navy.

Ships from the eastern bloc didn't last long due to the political change since 1966, which tended to the west. Automatically, spare parts became difficult and expensive resulting in a large total maintenance cost while the country's financial condition was unstable.

During the period of Guided Democracy, the Indonesian Air Force was the most sophisticated and frightening air force in the southern part of the world. Soviet Union-made aircrafts such as MiG-21 Fishbed and Tu-16 Badger, if compared to the current condition, were similar to F-35 Lightning II and B2 Spirit used by the US Air Force (USAF). Indonesia needed the main weaponry system as it was facing PRRI Peresta in 2 places at a time,

(Padang and Manado). However, aircrafts could not be provided from the United States as Indonesia was facing an embargo due to the political situation in which the country supported the Eastern Block. Therefore, to fulfill the need of the main weaponry system, the Indonesian Government purchased equipment from the Eastern Bloc. In addition, aid also came from China as a token of solidarity as fellow Asian nations. It offered 12 Tupolev bombers Tu-2, 24 units of Lapovckin La-11, and 12 units of combat jets MiG-17 made in China of type 56.

For Search and Rescue (SAR) mission and limited combats, the Indonesian Air Force was equipped with various helicopters including UH-34 Choctaw, a present from the United States in 1960, and the largest helicopter MI-6 from Russia.

PERIOD OF ORDE BARU (1966-1998)

In the 1970s, Indonesia received personnel transport tanks LAV 150 Commando and Commando Scout 150. In 1990s, the country received tanks of GIAT VAB type, light tanks Scorpion 90, APC Stormer and Panhard



source: patriotgaruda.com



VBL. The condition didn't last for long as an embargo was imposed to Indonesia following the unrest in East Timor in 1998.

Starting in 1980s, war ships of the Indonesian Navy made in East Europe which were the main strength of the Indonesian Navy in 1960-1970s, were considered to no longer fulfill the requirement for the Navy's duties. The worsening relations between Indonesia and the Soviet Union during Soekarno's presidency encouraged the Indonesian Navy to adopt western technology. It included Fatahillah-class missiled Corvets from the Netherlands, used Van Speijk-class missiled Fregats, submarines of class 209/1300 made in West Germany, Patrol Ship Killer-class missiled combat ships made in South Korea, and used Nomad Searchmaster maritime patrol aircrafts from the Australian Armed Forces. In 1990s, the Indonesian Navy received additional war ships of Parchim-class Corvets, Frosch-class Landing Ship Tanks (LST), and Kondo-class minesweepers.

For the Indonesian Air Force, 1970 will be remembered as the year where weapons from the Eastern Bloc were destroyed, making it a bad year for the air force. It was after the aircrafts from the Eastern Bloc, which once astonished the world, were grounded. During the era, the Indonesian Air Force only had transporters, train aircrafts, and helicopters as well as some combat aircrafts other than OV-10F which arrived by end of 1976. The Indonesian Air Force had to accept its destiny to be as it was and only capable of performing an air transportation function. Amidst this forced situation, aid came from the Western Bloc, in this case the United States, through the Defense Liaison Group (DLG) program. Some aircrafts of unarmed combat aircrafts, including 16 units of T-33A aircrafts and 18 units of F-86 Avo Sabre aircrafts, arrived from Australia.

F-5-E/F Tiger II which arrived in Indonesia in 1980 replaced F-86 Avon Sabre. The aircraft returned the respected MiG-21F

prestige in 1960s. In addition, 31 units of A-4E (single seater) and 2 units of TA-4 H (dual seater) also arrived in the same period. Further, the arrival of light combat jets Hawk 109/209 strengthening the Indonesian Air Force since 1996 was a solution to the need of simple and practical train combat jets. Eventually, in 1990, through the Peace Bimasena program, the Indonesian Air Force received F-16 Fighting Falcon aircrafts with fly by wire technology, computer-controlled, and a dog-fight capability in the air, making the aircrafts the foremost in their class. In 1970s, the Indonesian Air Force renewed C-47 transporters Dakota with Fokker F-27 TS (troop ship) from the Netherlands, making Indonesia the largest operator of Hercules C-130 in the southern part of the world.

For operational purposes the Indonesian Armed Forces also need air mobile elements to support the combat mission. The UH (Utility Helicopter) concept was considered the most ideal at that time as it could transport personnel, combat SAR, logistics, and medical

evacuation. It was also urged to be capable of shooting from the ground. To support the mission, there were 2 types of helicopters imported in 1977-1978. They were respectively 18 units of SA-330 made in France and Bell-205 A-1 for the Indonesian Army.

PERIOD OF ORDE REFORMASI (1998-PRESENT)

The military is much better arranged in this period, compared to the period of Orde Baru. Military is no longer used as a political tool and there is balanced expenditure for the three forces. Contemporary threats are no longer a country but a group or individuals as well cyber crimes, weapons smuggling, human and drugs trafficking, as well as security disturbances in the border areas.

In 2012, the Indonesian Government purchased the most sophisticated Artillery Saturation Rocket System named MLRS Astros II made in Avibras, Brazil. The Indonesian Army also received a new war machine, Main Battle



source: airliners.net

Tank (MBT) Leopard 2 made in Rheimentall, Germany, a type of tank with a shooting capability of 4 kilometers weighing 62 tonnes. In 2012, a contract was signed with Nexter, France, to purchase ME Armed 155mm self propelled howitzer to set up 2 howitzer Caesar battalions.

In the 2009-2014 Strategic Plan, procurement of the main weaponry system for the Indonesian Navy was the largest in the Indonesian history, including 3 units of submarines DSME-209 from South Korea with a big budget. The amount didn't include yet budget to construct infrastructure for the submarines in Indonesia. One of the 3 units of submarines is planned to be built in Indonesia.

For war ships, the Indonesian Navy purchases 2 units of Missile Destroyers (PKR) Sigma-10514 from the Netherlands. The Indonesian Navy is currently strengthened by 3 units of Multi Role Light Fregate war ships from the Great Britain. In 2017, 2 units of Missile Destroyers (PKR) Sigma Class 10514 made by Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) in the Netherlands and PT. PAL Indonesia (Persero) will arrive.

In addition, for operational activities in the sea, some units of KCR-40 and KCR-60 domestically produced and equipped with highly sophisticated missiles will join the weaponry system. Some units of Landing Ship Tanks (LST) which can be used to transport MBT Leopard will strengthen the Indonesian Navy. Some war ships have also been equipped with anti-ship missiles of the latest generation, namely Exocet MM-40 Block 3. For supporting ships, 2 units of Hydro Oceanography Help ships of Multi Purpose Research Vessel (MPRV) KRI RIGEL-933 and KRI SPICA-934 have begun their duties.

Sukhoi squad, famous for its cobra maneuver, slowly strengthens the Indonesian Air Force in 2003, 2007, and 2012 making it one complete squadron with 16 units. In addition, to strengthen the squadron of F-16 A/B aircrafts, the Ministry of Defense has also acquired 24 units of F16 C/D aircrafts known as the Peace Bimasena II project. Other latest combat aircrafts are 1 squadron of EMB 314 made in Brazil and 1 squadron of T-50i LIFT combat aircrafts made in South Korea. Indonesia will

also soon be equipped with helicopters for SAR, namely EC725 Super Cougar made in PTDI in cooperation with Airbus Helicopter France. The Indonesian Navy's helicopters will be equipped with AS 565 Panther as Anti Submarine helicopters.

Meanwhile, the Indonesian Army will be equipped with AS 550 Fennec as Anti Attack helicopters. PTDI cooperates with Airbus Military Spain to build CN 295 for the Indonesian Air Force. A German factory will also participate in building the Indonesian Air Force with 24 units of train aircrafts Grob G-120TP. Particularly for the air defense, Indonesia is now equipped with Air Deterrent Weapons Oerlikon Sky Shield made in Rheinmetall Air Defence, Switzerland.

It can be concluded that within a period of 70 years, the main weaponry system of the Indonesian Armed Forces has significantly



developed in quantity and technology, affected by the military challenges, the political situation, and the economic condition. Compared to weapons in the world, our weapons may not be the most sophisticated. However, it's hoped that the weapons are capable of facing various threats that we are now facing. It's predicted that half of the total need for the main weaponry system has been fulfilled according to the Minimum Essential Force (MEF) of the Indonesian Armed Forces. It's also hoped that in 2024, the whole need will be fulfilled.

The most important thing to remember and consider as well as prepare in the future is that we may not stop at a point where we can only purchase the main weaponry system. More than that, we must be able to maintain the system's combat readiness until it comes to its end. This can only be realized when we always catch up with technology development of each

system, supported by a prepared budget to maintain continuity of the supporting logistics. Without a budget which is prepared as early as possible, it's impossible that the main weaponry system is usable when needed. In addition, empowerment of the national capability to support the main weaponry system must be increased in the future towards independence.



source: garudamiliter.blogspot.com

VISIT OF THE MINISTER OF DEFENSE TO NATUNA FOR STRENGTHENING THE STATE DEFENSE IN THE FOREMOST REGION

By:
Budiono
Staff of Public Communication Cetre of MOD



Natuna Islands is one of the islands located at the strategic border in the far north of Indonesia. Natuna Sea is the main line of various foreign ships for world sailing activities, from commercial ships, fishing ships, to war ships. The total area of Natuna Islands is 2,631 square kilometers. It's strategically located for international commercial shipping and has millions of natural resources.

VISIT OF THE MINISTER OF DEFENSE TO NATUNA

As a follow up to the policy made by the Government to strengthen facilities and infrastructures of the state defense in Natuna, several time ago, Minister of Defense, Ryamizard Ryacudu, accompanied by a number of high officials of the Ministry and



the Indonesian Armed Forces, paid a visit to Natuna Island, which is the outermost and the far north island of the Unitary State of the Republic of Indonesia at the Province of Riau Islands.

The two-day visit was aimed at observing and getting first-hand information on the island's condition, particularly facilities and infrastructures of the state defense. Result of the visit will be materials in formulating a policy related to strengthening the state defense in Natuna region.

It was the first visit of the Minister of Defense to Natuna. Using Boeing aircraft of the Indonesian Armed Forces, the Minister arrived at Ranai Airport. He was greeted by Commander of the Military Area/Bukit Barisan, Major General Lodewyjk Pusung and Natuna Regent, Ilyas Sabli. He was greeted by Repak Sirih dance.

Upon his arrival, accompanied by the Inspector General of the Ministry of Defense, Air Marshal Ismono Wijayanto, and some high officials of the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces, the Minister visited some defense facilities and infrastructures, including Ranai Airbase of the Indonesian Air Force, Ranai Base of the Indonesian Navy, and the Military District Command (Kodim) 0318/Natuna, and the Infantry 134/TS battalion.

Regent of Natuna, who welcomed the Minister and his entourage, said that the people of Natuna were flattered and happy as the Minister took time to visit Natuna, in spite of the far location. Further, the Regent explained that the Regional Government of Natuna, along with the local people and the Regional House of Representatives, always catch up with development in other regions. After 16 years since its establishment. Natuna encourages development as there remain a lot of things to build.



Natuna regency consists of 12 districts, 70 villages, 6 sub districts, spreading in 154 islands. Out of the 154 islands, only 27 islands are inhabited, the remaining islands are still empty. Some 97,5 percent of Natuna area is waters.

In development activities, the Regional Government of Natuna Regency always cooperates and coordinates with all elements of the regional management, particularly the Indonesian Air Force, the Military District Command, the Resort Police, and so on. "We work together in togetherness in a comfortable, secure and peaceful situation. Together we protect the people," the Regent explained.

STRENGTHEN FACILITIES AND INFRASTRUCTURES OF THE NATIONAL DEFENSE

Meanwhile, the Minister of Defense stated that the Government, through the Minister of Defense, will strengthen facilities and infrastructures of the state defense in Natuna region, in the Province of Riau Islands. The Ministry will complete Natuna Islands by constructing a seaport for the base of the Indonesian Navy. It will also widen the runway of the Indonesian Air Force airbase. The Ministry of Defense will also deploy combat planes, add a number of warships and patrol boats



to secure the territory of Natuna Islands from marine crimes and violation to the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. "The Ministry of Defense will deploy combat planes, warships, the latest radar, and drones here (Natuna)," said the Minister.

Further, the Minister of Defense said that increasing facilities and infrastructures of Natuna is aimed at providing security for the people of Natuna and the entire people of Indonesia. In addition, the number of personnel of the Indonesian Armed Forces will be added to 2,000 to guard Natuna waters. The additional personnel come from a number of elite forces in the Indonesian Armed Forces, such as the Special Force of the Indonesian Air Force (Kopaskhas), the Marine Corps of the Indonesian Navy, and Raider of the Indonesian Army. "We don't just add the main weaponry system in Natuna, but also the personnel," the Minister explained.

The Minister of Defense added that the policy of increasing facilities and infrastructures of the state defense in Natuna is expected to affect economic development. It's hoped that the people of Natuna will feel secure and comfortable in their economic activities. "The main weaponry system will be added, so will the personnel so that Natuna will be increasingly secure and the economic activities will increase, because at least 2,000 persons will be here," he explained.

In addition, to strengthen the state defense in Natuna region, the Ministry of Defense is planning to give knowledge to the 85 thousand inhabitants so that they have nationalism.

TAKING TIME TO VISIT SEKATUNG ISLAND, THE FOREMOST ISLAND FACING DIRECTLY THE SOUTH CHINA SEA

During his visit to Natuna, the Minister of Defense also took time to observe border security posts and the outermost island at Sekatung Island. Sekatung Island is the foremost island which is adjacent to Vietnam and directly facing the South China Sea. Administratively, Sekatung Island is included in Pulau Laut District, Natuna regency, Riau Islands Province. Sekatung Island is the outermost non-inhabited island in the northern part of Natuna Islands. It is north of Pulau Laut and is one of 12 outermost islands that need a special treatment.

At Sekatung Island, the Minister of Defense was greeted by soldiers from Marine Brigade 8 Brandan Medan and Infantry Battalion 134 Reider Batam of the Indonesian Armed Forces, who are in a duty of securing the border zone. Also present was Head of Pulau Laut District, Anrizalzen, ST, and his staff from the Regional Management of Pulau Laut District.

Apart from giving a briefing to the soldiers, the Minister also had a dialogue with Head of Pulau Laut District and his staff as well as the people of Pulau Laut, which is adjacent to Sekatung Island.

Matters stated by the Minister of Defense to the soldiers during the occasion included his gratitude to the soldiers who have well performed their duties. The Minister hoped that they would perform the remaining duties well and with the same spirit.

The Minister of Defense also conveyed his message that the soldiers should stay ready and alert. In performing their duties, the soldiers were asked to maintain and set up good relations with the surrounding people, and to invite or give them an understanding of national awareness so that they have nationalism.

In addition, the soldiers were also asked to stay unified with the local people as it takes the Indonesian Armed Forces and the people to defend the country and the nation.

From his visit to Sekatung, the Minister of Defense found that there remained a lot of things to improve, such as clean water, electricity, and barracks for the soldiers assigned at the border posts of Sekatung Island. The Minister promised that he would repair the solar cell which sometimes got broken, and build two additional barracks and hall, including a border post. He admitted that the communication network for cellular phone users still faces obstacles as there was no tower. However, the communication network for military uses faces no problem.

The Minister of Defense also promised that he would coordinate with the Minister of Transportation, to pay attention on the matter. "We pay attention to the problem of communication network not only in Natuna, but also in every border, such as in Kalimantan and Papua," he said.

In the future, the Indonesian Government is expected to continue to strengthen the state defense in Natuna region, by both adding the main weaponry system as well as the personnel and the state defense awareness of the people in Natuna. This way, Indonesia will really have sufficient defense power as an effect deterrent to guard Indonesia's sovereignty, particularly in Natuna Islands, from any possibility of big conflicts that may happen anytime.





DIRECTORATE GENERAL OF DEFENSE POTENTIAL



POSITION, TASKS, AND FUNCTIONS

Directorate General of Defense Potential (*Ditjen Pothan*)

Is executing elements of tasks and functions of defense under and responsible to the Minister. *Ditjen Pothan* is led by the Director General of Defense Potential (*Dirjen Pothan*) whose task are to formulate and implement policies and technical standardization in non-military defense potential.

In conducting its tasks, *Ditjen Pothan* has following functions:

- a. formulation of policies in non military defense potential;
- b. implementation of policies in non military defense potential non includes awareness of State Defense, reserve component, supporting component, development of technology and defense industries as well as veteran development;
- c. formulation of norms, standards, procedures, and criteria in non military defense potential;
- d. providing technical guidance and evaluation in non military defense potential; and
- e. administration of *Ditjen Pothan*

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Ditjen Pothan consists of a Secretariat and five Directorates:

1. Secretariat of Directorate General (*Set Ditjen*).

Secretariat of Directorate General (*Set Ditjen*) is assisting element of the Directorate General. It is led by Secretary of Directorate General (*Ses Ditjen*) whose task is to provide technical and administration services of *Ditjen*.

In conducting its tasks, *Set Ditjen* has following functions:

- a. planning, implementation, control, accounting, financial administration management, budget calculation and assessment, evaluating and program and budget reporting; as well as performance accountability reporting of *Ditjen*;
- b. personnel development, financial administration, materials, administration and internal affairs as well as institutional arrangement and management of *Ditjen*;
- c. management of data and information as well as documentation and library of *Ditjen*; and
- d. staff coordination and supervision.

Set Ditjen consists of:

- a. Program and Reporting Section
- b. Data and Information Section
- c. General Affairs Section
- d. Functional Job Section

2. Directorate of State Defense (*Dit Belneg*).

Direktorat of State Defense (*Dit Belneg*) is executing elements of tasks and functions of the Directorate General of Defense Potential. It is led by the Director of State Defense (*Dir Belneg*) whose tasks are to formulate and to implement policies and technical standardization, to provide technical guidance and evaluation in awareness development of State Defense.

In conducting its tasks, *Dit Belneg* has following functions:

- a. formulation of policies in fostering awareness of State Defense development sector;
- b. formulation of standards, norms, guidelines, criteria and procedures in fostering awareness of State Defense in education, settlement and occupational environment;
- c. implementation and evaluation of policies in fostering awareness of State Defense in education, settlement and occupational environment;
- d. guidance, supervision and licensing in fostering awareness of State Defense in education, settlement and occupational environment; and
- e. administration and internal affairs of the Directorate.

Dit Belneg consists of:

- a. Sub-directorate of Educational Environment
- b. Sub-directorate of Settlement Environment
- c. Sub-directorate of Occupational Environment
- d. Administration Sub-section
- e. Functional Job Section





3. Directorate of Reserve Components (*Dit Komcad*).

Direktorat of Reserve Components (*Dit Komcad*) is executing elements of tasks and functions of *Ditjen Pothan*. It is led by the Director of Reserve Component (*Dir Komcad*) whose tasks are to formulate and to implement policies and technical standardization, providing technical guidance and evaluation in formation and development of reserve component.



In conducting its tasks, *Dit Komcad* has following functions:

- a. formulation of policies in formation and development of reserve component;
- b. formulation of standards, norms, guidelines, criteria and procedures in formation and development of reserve components of army, navy and air force sectors;
 - c. implementation and evaluation of policies in formation and development of reserve components of army, navy and air force sectors;
 - d. guidance, supervision, and licensing in formation and development of reserve components of army, navy and air force sectors; and
 - e. Administration and internal affairs of *Dit Komcad*.



Dit Komcad consists of:

- a. Sub-directorate of Army Service
- b. Sub-directorate of Navy Service
- c. Sub-directorate of Air force Service
- d. Administration Sub-section
- e. Functional Job Section

4. Directorate of Supporting Component (*Dit Komduk*).

DIRECTORATE OF SUPPORTING COMPONENTS (*Dit Komduk*) is executing elements of tasks and functions of the Directorate General of Defense Potential. It is led by the Director of Supporting Component (*Dir Komduk*) whose tasks are to formulate and to implement policies and technical standardization, providing technical guidance and evaluation in formation and development of supporting component.



In conducting its tasks, *Dit Komduk* has following functions:

- a. formulation of policies in formation and development of Supporting Component;
- b. planning of standardization, norms, guidance, criteria and procedures in structure and development of human resources, natural resources and man-made resources as well as infrastructure of supporting components;
- c. guidance, supervision and licensing in structure and development of human resources, natural resources and man-made resources as well as infrastructure of supporting components;
- d. control and evaluation of policies in structure and development of human resources, natural resources and man-made resources as well as infrastructure of supporting components; and
- e. administration and internal affairs of *Dit Komduk*.

Dit Komduk consists of:

- a. Sub-directorate of Human Resources
- b. Sub-directorate of Natural and Man-Made Resources
- c. Sub-directorate of Infrastructure
- d. Administration Sub-section
- e. Functional Job Section

5. Directorate of Defense Technology and Industry (*Dit Tekindhan*).

Direktorat of Defense Technology and Industry (*Dit Tekindhan*) is executing elements of tasks and functions of the Directorate General of Defense Potential. It is led by the Director of Defense Technology and Industry (*Dir Tekindhan*) whose tasks are to prepare formulation and implementation of policies and technical standardization, providing technical guidance, defense industry technology development, licensing and evaluation in development of defense technology and industry.

In conducting its tasks, *Dit Tekindhan* has following functions:

- a. preparation of policy formulation in technology development and defense industry as well as national industries that potentially able to support defense industry;
- b. formulation of standards, norms, guidelines, criteria and procedures in defense technology, industrial utilization, defense industry, national industry as well as technology administration;
- c. guidance, supervision and licensing in technology, defense industry, industrial utilization, and licensing as well as a national industry that potentially able to support defense industry;



- d. implementation of defense industry technology development, industrial utilization as well as system governance and development of national industry that potentially able to support defense industry;
- e. Offset defense data collection from planning to implementation in order to support advancement of defense industry; and
- f. administration and internal affairs of *Dit Tekindhan*.

Dit Tekindhan consists of:

- a. Sub-directorate of Defense Technology
- b. Sub-directorate of Defense Industry
- c. Sub-directorate of Defense Industry Utilization and Cooperation
- d. Sub-directorate of Licensing
- e. Administration Sub-section
- f. Functional Job Section

6. Directorate of Veteran (*Dit Vet*).

Direktorat of Veteran (*Dit Vet*) is executing element of tasks and functions of the Directorate General of Defense Potential. It is led by the Director of Veteran (*Dir Vet*) whose tasks are to formulate and to implement policies and technical standardization, to provide technical guidance and evaluation of veteran sector in the Republic of Indonesia.

In conducting its tasks, *Dit Vet* has following functions:

- a. preparation of policy formulation in the veteran sector of the Republic of Indonesia;
- b. standardization, norms, guidance, criteria and procedures in social communication, data collection and administration of veterans of the Republic of Indonesia, including administration of awarding honors of veteran and rights of veterans such as veterans' benefits, veteran honors fund and benefits for the widows, widowers, and orphans of the veterans;
- c. guidance, technical supervision in social communication, data collection and administration of veterans, administration of awarding honors of veteran and rights of veterans such as veterans' benefits, veteran honors fund and benefits of the widows, widowers, and orphans of the veterans;



- d. policy implementation and evaluation in social communication, data collection and administration of veterans, administration of awarding honors of veteran and rights of veterans such as veterans' benefits, veteran honors fund and benefits of the widows, widowers, and orphans of the veterans; and
- e. administration and internal affairs of *Dit Vet*.

Dit Vet consists of:

- a. Sub-directorate of Social Communication
- b. Sub-directorate of Veteran Administration
- c. Subdirektorat Data Sub-directorate of Data
- d. Administration Sub-section
- e. Functional Job Section





